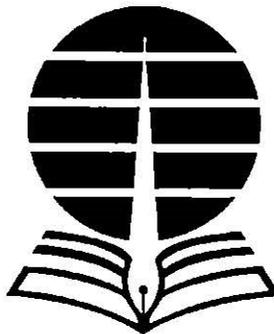


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

A. DARSAN

NIM. 500633191

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

A.DARSAN

darsanmap@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Musi Rawas dalam hal penanganan bencana baik pencegahan, saat terjadi bencana maupun pra bencana atau masa pemulihan, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tuntas mengenai tingkat efektivitas organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten musirawas dalam hal penanganan bencana dan kemudian mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu, teknik analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat memudahkan untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa penempatan individu tidak optimal dengan latar belakang pendidikan hal ini terkait dengan sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki, sistem koordinasi dengan instansi terkait. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan upaya penanganan bencana melalui pembentukan relawan-relawan bencana yang ditempatkan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas serta melakukan kerja sama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan penanganan bencana, dibutuhkan peralatan kebencanaan dan alokasi dana untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu adanya dilakukan pendidikan, pelatihan dan diklat kebencanaan secara sistematis dan berkelanjutan serta untuk jangka panjang perlu dilakukan pola rekrutmen yang memperhatikan tingkat pendidikan dari pegawai yang berbasis pendidikan yang mendukung kegiatan penanganan bencana.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Juli 2017

Yang Menyatakan



A.DARSAN
NIM. 500633191

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : A.Darsan
NIM : 5000633191
Judul TAPM : Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis/20 Juli 2017

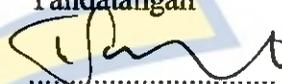
Waktu : 09.30-11.00 WIB

Dan Telah Dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
DR. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Tandatangan



Penguji Ahli
Prof.DR. Aries Djaenuri, M.A



Pembimbing
DR. Drs. Liestyodono B.Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
Penyusun TAPM : A.Darsan
NIM : 500633191
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing



DR. Drs. Liestyodono B.Irianto, M.Si

NIP. 195812151986011009

Penguji Ahli



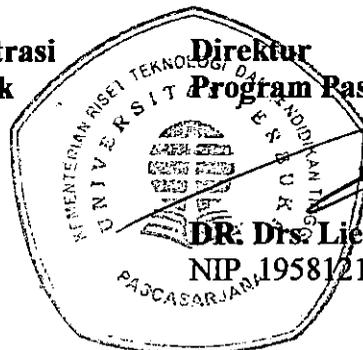
Prof.DR. Aries Djaenuri, M.A

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Administrasi Publik



DR. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Direktur
Program Pasca Sarjana

DR. Drs. Liestyodono B.Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya jualah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka dan selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan segala perhatian dan arahan yang terbaik bagi penulis.
3. Bapak Ir. Adi Winata, M.Si selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Palembang beserta jajaran pejabat dan staf di UT UPBJJ Palembang.
4. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, Dr. Andrieas Lionardo, S.IP, M.Si dan Dr. Raniasa, S.IP, M.Si) yang telah mendidik selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka.
5. Isteriku tercinta Eva Susanti, SE dan anakku tersayang Hari Mulya Fatullah, Adeliya Putri Aisyah dan Abiyu Daffa Assalam yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan buat penulis.

6. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atas kepercayaan dan dukungan yang di berikan kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Terbuka Angkatan IV Kota Lubuklinggau terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, serta kekompakkannya dalam suka maupun duka.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga TAPM ini dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca semua. Amin.

Lubuklinggau, Juli 2017
Penulis,



A. DARSAN
NIM. 500633191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax. (021). 7415588

BIODATA

Nama : A.DARSAN

NIM : 5000633191

Tempat dan Tanggal Lahir : Negeri Sindang, 07 April 1974

Registrasi Pertama : 2015

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 02 Baturaja (Tamat Tahun 1986)
SMP Negeri I Baturaja (Tamat Tahun 1989)
SMEA Negeri Baturaja (Tamat Tahun 1992)
S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
(Tamat Tahun 2001)

Riwayat Pekerjaan : - Staf Kantor Camat Karang Dapo
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- Staf Bagian Kesra Pemkab Musi Rawas
2000
- Staf Dinas Perhubungan Pemkab Musi
Rawas Tahun 2002
- Seklur Muara Kelingi Pemkab Musi
Rawas Tahun 2005
- Kasi Pelayanan Medik RS. Dr. Sobirin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006
- Kasi Pemerintahan Kec. Tuah Negeri
Pemkab Musi Rawas Tahun 2007 s.d
Sekarang

Alamat Tetap : Jl. Beringin II RT. 001 Watervang
Lubuklinggau - Sumatera Selatan 31614

Handphone : 082282709992

Email : darsanmap@gmail.com

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Abstrak	i
Pernyataan Plagiat	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Biodata	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Efektivitas Organisasi	9
2. Produktivitas Organisasi Atau Output	12
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi	16
B. Kajian mengenai tugas pokok dan fungsi	25
C. Penelitian terdahulu	26
D. Kerangka berpikir	31

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	32
B. Sumber data.....	32
C. Instrumen Penelitian.....	33
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Analisis Data.....	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

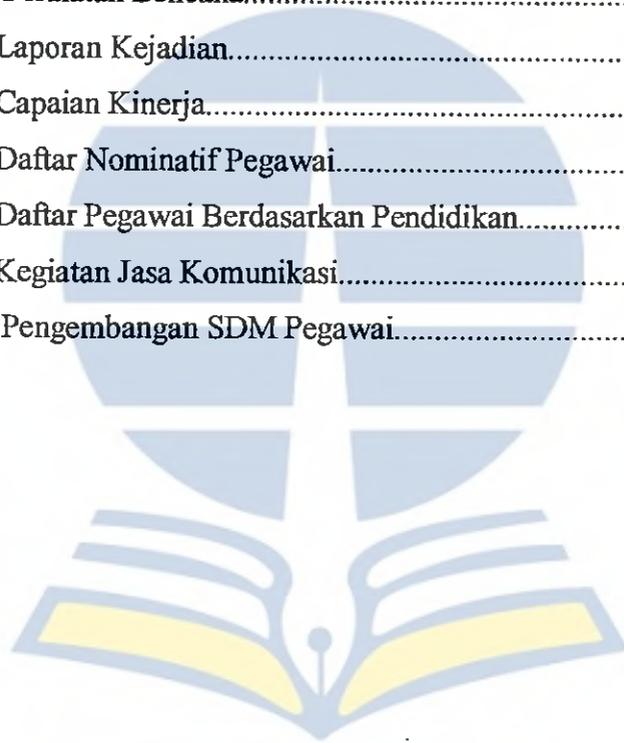
A. Diskripsi Objek Penelitian.....	38
1. Keadaan Geografis	38
2. Topografi.....	39
3. Geologi.....	40
4. Iklim.....	40
5. Demografis.....	43
6. Agama.....	44
7. Sosial Budaya.....	45
8. Pengembangan Wilayah.....	48
9. SDA dan Lingkungan Hidupi	50
10. Ekonomi	52
B. ORGANISASI BPBD	
1. Sejarah Singkat	54
2. Visi Misi.....	56
3. Tujuan dan Sasaran.....	59
4. Tugas pokok dan Fungsi.....	60
5. Jenis-jenis Bencana Alam.....	65
6. Sarana dan Prasarana.....	68
7. Data Kejadian Bencana.....	69
C. EFEKTIFITAS BPBD	
1. Tujuan	72
2. Struktur.....	79
3. Sistem Penghargaan.....	86
4. Mekanisme kerja.....	89

5. Tata Hubungan.....	97
6. Kepemimpinan.....	105
D. PEMBAHASAN.....	107
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan.....	111
2. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	116



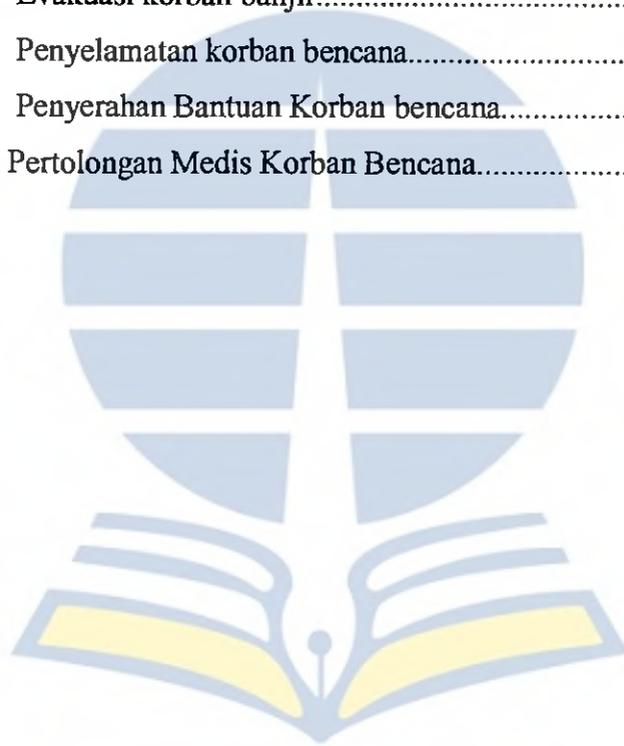
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pelaksanaan Anggaran.....	4
Tabel 1.2. Jarak Tempuh Kecamatan dengan Kabupaten.....	6
Tabel 1.3. Rekapitulasi Kejadian Bencana.....	7
Tabel 4.1. Jumlah Masyarakat Miskin.....	31
Tabel 4.2. Pengembangan Wilayah.....	47
Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	48
Tabel 4.4. Peralatan Bencana.....	53
Tabel 4.5. Laporan Kejadian.....	68
Tabel 4.6. Capaian Kinerja.....	69
Tabel 4.7. Daftar Nominatif Pegawai.....	75
Tabel 4.8. Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	81
Tabel 4.9. Kegiatan Jasa Komunikasi.....	82
Tabel 4.10. Pengembangan SDM Pegawai.....	84



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1. Kantor BPBD Musi Rawas.....	55
Gambar 4.2. Peta Rawan Bencana.....	90
Gambar 4.3. Surat Edaran Bupati Musi Rawas.....	91
Gambar 4.4. Pengawasan ke Perusahaan.....	92
Gambar 4.5. Posko Siaga Banjir	93
Gambar 4.6. Evakuasi korban banjir.....	94
Gambar 4.7. Penyelamatan korban bencana.....	96
Gambar 4.8. Penyerahan Bantuan Korban bencana.....	100
Gambar4.9. Pertolongan Medis Korban Bencana.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Era reformasi saat ini telah menghantarkan bangsa Indonesia memasuki suasana kehidupan baru yang penuh harapan akan terjadinya berbagai langkah-langkah perbaikan dalam menata sistem pemerintahan. Dengan harapan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai kondisi dan kemampuan sendiri. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui kebijakan desentralisasi otonomi.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun. 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Th. 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Pemda. Dengan adanya Undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.

Oleh karena itu, dengan diberikannya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah Kabupaten dan Kota melalui otonomi daerah, dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kiprah untuk mengembangkan inisiatif dan kreatifitas untuk memikirkan, merumuskan, merencanakan bagaimana menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi riil yang ada di daerah untuk melaksanakan pembangunan bagi kemandirian daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, masalah dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah seberapa jauh kesiapan Daerah melaksanakan dilihat dari:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Daerah;
2. Aspek kemampuan keuangan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah;
3. Aspek kelembagaan/organisasi Daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi Daerah dalam sistem kelembagaan/organisasi diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 tahun 2014 Pasal 5 tentang uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berbunyi:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana;
2. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat Daerah, lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
3. Pengkomandoan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, institusi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
4. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan integrasi dengan SKPD lainnya di daerah, institusi vertikal yang ada didaerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Musi Rawas sering di landa bencana banjir, puting beliung, tanah longsor dan kebakaran, namun kurang tanggapnya dalam penanganan penanggulangan bencana menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan koordinasi untuk penanggulangan bencana kurang berjalan dengan baik. Pada situasi darurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang mengakibatkan mempersulit penanganan. Dari kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penangananan, serta pelaksanaan penanganan terkesan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. Secara obyektif dalam pengukuran efektivitas organisasi terdapat berbagai kesulitan:

Pertama, yaitu kompleksitas organisasi, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari perangkat lunak dan keras yaitu struktur sumber daya manusia dan anggaran. Struktur meliputi adanya kewenangan dan tanggung jawab, sumber daya manusia menyangkut berbagai keahlian yang dibutuhkan langsung maupun tidak langsung, seperti bencana longsor, bencana banjir, bencana angin puting beliung dan kebakaran lahan/hutan. Dengan jumlah sumber daya manusia atau pegawai 56 orang yang terdiri dari terdiri dari Aparatur Sipil Negara 19 orang dan Honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah 37 orang.

Kedua, berdasarkan pelaksanaan anggaran kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 1.1 Pelaksanaan anggaran dan program BPBD tahun 2015-2016

Tahun	Anggaran	Jumlah program
2016	1.160.000.000	20 program kerja
2015	1.000.000.000	16 program kerja

Sumber Data: Rencana Startegis BPBD tahun 2016 dan 2015

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun tahun 2016 jumlah anggaran sebesar Rp. 1.160.000.000 dari 20 program kerja yang dilaksanakan dan pada tahun 2015 anggran sebersar Rp. 1.000.000.000 dengan jumlah kegiatan 16 yang dilaksanakan . Jadi dengan tingginya angka bencana, peralatan kerja yang sangat terbatas, dan masih rendanya kualitas yang dihadapi dalam bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ketiga, adanya perbedaan kegiatan. Unit-unit pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat, dengan sistem kerjasama dengan pihak dalam penanggulangan bencana, sistem penanggulangan bencana yang handal dan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh dari seluruh pegawai dan masyarakatan. Dalam pencapaian kinerja keuangan pegawai sebesar 93,80%. Karena kurang optimalnya dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai dan masih tingginya tingkat keritisnya masyarakat terhadap pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Keempat, pengukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan dari satu periode ke periode yang lain (*time series*) memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Keempat, Kurangnya sistem komunikasi dan koordinasi didalam hubungan internal dan eksternal, sehingga kurangnya cepat tanggapan dalam permasalahan bencana longsor, bencana banjir, dan bencana angin puting beliung dan kebakaran lahan/hutan.

Melihat kenyataan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini digunakan rancangan satu dimensi, dan bukan multi dimensi, sehingga analisis yang digunakan akan membahas fenomena efektivitas dari masing-masing variabel yang dimunculkan dan dianggap dominan mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Musi Rawas.

Sehubungan dengan realitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien, maka sebaiknya perlu dikaji ulang mengenai Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yakni dalam kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam kondisi seperti ini, maka efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dan kondisi lingkungan serta kebijakan manajemen akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan penanganan penaggulangan bencana.

Mencermati kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan peningkatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien di Kabupaten Musi Rawas, langkah yang paling tepat adalah mengkaji ulang mengenai bagaimana Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganaan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efesien di Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan dengan baik dari segi sumber daya manusia yakni petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas maupun dari segi masyarakat dan kondisi wilayah tempuh dari Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan wilayah tempuh Kabupaten Musi Rawas yang dialiran oleh tiga sungai utama yang umumnya dapat dilayar yaitu sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Kelingi 14 jumlah kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Musi Rawas. Kecamatan yang berjarak dari kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Table 1.2 Jarak Kecamatan dengan Kabupaten Musi Rawas

No	Nama Kecamatan	Jarak Ke Kabupaten Musi Rawas (km)
1	STL Ulu Terawas	54
2	Selanggit	42
3	Sumber Harta	34
4	Tugumulyo	21
5	Porwodadi	36
6	Muara Beliti	3
7	TP. Kepunggut	26
8	Jayaloka	42
9	Suka Karya	35
10	Muara Kelinggi	36
11	BTS Ulu	61
12	Tuha Negeri	21
13	Muara Lakitan	73
14	Megang Sakti	56

Sumber Data: Badan Pusat Statistik tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jarak tempuh setiap kejadian di setiap kecamatan sangatlah susah, dan didukungnya sarana sumber daya manusia yang kurang memahami sistem permasalahan musibah bencana. Dari data diatas dan

didasari dengan kejadian bencana di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 dan 2016 di bawah ini, antara lain:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Musi Rawas

No	Tahun	Jenis Bencana	Jumlah bencana
1	2016	Banjir	15
2	2016	Kebakaran lahan	2
3	2016	Kebakaran Rumah	3
4	2016	Puting Beliung	1
5	2015	Kebakaran Lahan	19
6	2015	Kebakaran Rumah	8

Sumber data: Laporan Kejadian Bencana tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mencoba meneliti dan mendeskripsikan masalah penanggulangan bencana dan penanganannya dengan cepat, tepat, efektif dan efisien di Kabupaten Musi Rawas dengan mengambil judul **“Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan realitas masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang perlu penulis teliti dan kaji lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas belum berjalan sesuai apa yang diharapkan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana dan penanganannya dengan cepat, tepat, efektif dan efisien di Kabupaten Musi Rawas.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis efektivitas organisasi pada pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas belum berjalan sesuai apa yang diharapkan.
2. Menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana dan penanganannya dengan cepat, tepat, efektif dan efisien di Kabupaten Musi Rawas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep ilmu manajemen publik, khususnya dalam analisa efektivitas organisasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah yang memperhatikan prospek kedepan efektivitas tersebut dengan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini secara khusus diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Penanggulangan bencana di Kabupaten Musi Rawas dan secara umum dapat menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota lain yang berbasis rawan bencana di Indonesia dalam pengembangan wilayah hutan dan sungai dalam khususnya industri perkebunan dan lain-lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam upaya memecahkan permasalahan di sektor Penanggulangan Bencana teori yang merupakan titik tolak berfikir yang dapat memberikan pondasi dan pedoman yang bersifat teoritis. Aplikasi dilapangan terkadang suka berbeda antara aspek teoritis dengan praktek yang sangat dipengaruhi dengan keadaan. Namun apabila dalam praktek tersebut memiliki landasan teori yang kuat dapat membawa keteraturan, kesederhanaan dan mekanisme yang jelas dalam mencapai tujuan. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya dengan masalah merupakan hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah.

Sektor Penanggulangan Bencana merupakan variabel yang dipengaruhi (*dependent* variabel) dan diasumsikan yang mempengaruhinya ialah efektivitas mengenai organisasi. Artinya bagaimana dan efektivitas jenis apa yang ada serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas, sehingga membawa keberhasilan kegiatan di sektor Penanggulangan Bencana.

Melalui pendapat para ahli yang membahas kebijakan beserta unsur-unsurnya dan dengan berbagai komponen yang memperluas bahasan dapat dijadikan pegangan bagi pemecahan masalah.

1. Efektifitas Organisasi

Efektifitas Organisasi adalah Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang

sudah ditetapkan. Konsep Efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

Sedangkan menurut Miller (1977: 292) mengemukakan bahwa :

“Effectiveness be define as the degree to wich a social system achieve its goals. Effectiveness must be distingiished from efficiency. Efficiency is mainly concered with goal attainments.” (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum (dalam Etzioni, 1969: 82) mengemukakan *“organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, ulfil it's objective without incapacitating it's means and resours and without placing strain upon it's members”*. Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya

Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dan

menurut Hall (1974: 96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauhmana suatu organisasi merealisasikan tujuannya. Semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedang bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris (dalam Siliss, 1968: 312) yang mengatakan "*Organizational efectiveness then is balanced organisation optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization*". Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Berarti bicara mengenai efektivitas organisasi ada dua aspek didalamnya yaitu:

1. Tujuan organisasi dan
2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam penelitian ini perspektif efektivitas organisasi yang digunakan adalah perspektif tujuan, dimana tolok ukur yang digunakan adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisir visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Jadi tolok ukur efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas meliputi tingkat dalam melakukan dan penanganan bencana dengan cepat, tepat, efektif dan efesien.

Sharma (1982: 314) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi yang meliputi antara lain:

2. Produktivitas organisasi atau *output*

Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Konsep Sharma tersebut diatas jelas meyangkut tiga elemen yang berbicara mengenai produktivitas organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi mengelola dan mengatasi konflik internal yang terjadi.

Rancangan terhadap studi tentang efektivitas organisasi meliputi ketiga konsep yang diajukan oleh Steers diatas dimana ketiganya saling berhubungan. Sifat hubungan dilihat antara elemen-elemen tersebut mempengaruhi untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan organisasi yang mungkin atau layak dicapai. Steers (1985: 206) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Sementara menurut Gibson et. al, Siagian (1986: 33) mengatakan pula bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Definisi-definisi tersebut melihat efektivitas organisasi dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun organisasi dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertian sebagai misi akhir adalah pekerjaan yang sulit, karena sering tujuan yang dikejar oleh suatu organisasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari sudut ini maka organisasi tidak pernah mencapai tujuannya dalam pengertian yang akhir atau selalu ditandai dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Karenanya kemudian berkembang dari pemikiran lain mengenai penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari berbagai multi disiplin pengetahuan.

Kenyataan dalam upaya mencapai tujuan akhir, organisasi harus mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Jadi dapat diterima pandangan Steers (1985: 5) yang menilai efektivitas organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Dalam pengertian ini pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai dan optimal, tampak lebih realistik untuk tujuan evaluasi daripada menggunakan

tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran. Sehingga keberhasilan dapat dilihat dari berbagai kriteria yang dikembangkan oleh para ahli namun karena masing-masing organisasi adalah unik, maka tidak ada rangkaian teratur yang dapat diterima secara umum.

Memperhatikan pendapat ahli diatas bahwa dipahami konsep efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional. Multidimensional ini terjadi karena antara satu ahli dengan yang lainnya memiliki dasar ilmu yang berbeda walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Meskipun efektivitas tersebut telah diuji dan terbukti berhubungan positif dengan efektivitas organisasi, namun dikemukakan oleh Steers masalah yang dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertiannya adalah sebagai misi akhir dari tujuan organisasi. Salah satunya adalah banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu, yaitu kriteria yang dipakai untuk mengukur efektivitas organisasi pada waktu tertentu mungkin tidak tepat lagi atau menyesatkan pada waktu berikutnya.

Hal ini terjadi karena pendekatan keanekaragaman terhadap masalah yang merintangai usaha pengukuran yang meliputi:

1. Kriteria evaluasi yang ada sering tidak mantap;
2. Untuk perspektif waktu yang berbeda-beda (jangka pendek versus panjang);
3. Kriteria seringkali bertentangan satu sama lain;
4. Sebagian kriteria tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis organisasi tertentu;

5. Sebagian kriteria mungkin sulit diukur dengan tepat. Yang penting ialah setiap usaha untuk menilai tingkat efektivitas organisasi yang berlaku saat ini harus didahului oleh analisis yang teliti mengenai kemungkinan pembatasan atau bidang kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha evaluasi. Jika dalam penilaian didapatkan kriteria evaluasi yang tidak tepat, penilaian yang dihasilkan mungkin tidak ada gunanya.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa dalam pengertian efektivitas organisasi tercakup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi dan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara anggota organisasi.

Kelima kriteria yang dikemukakan oleh Steers diatas tidak semuanya relevan untuk diaplikasikan dalam mengukur tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, umpamanya kemampuan ber laba mengingat instansi ini bukan organisasi pencari laba. Oleh karenanya penulis hanya menggunakan kriteria produktivitas, yang dalam hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi sebagaimana mandat yang diterimanya.

Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi dimana organisasi sebagai sesuatu wadah usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukannya, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi. Untuk itu produktivitas yang sedang diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana sumber daya yang ada disertakan dan dipadukan untuk mencapai suatu hasil tertentu merupakan hal yang

dapat dijadikan tolok ukur efektivitas organisasi, karena pada dasarnya efektivitas organisasi merupakan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Produktivitas merupakan rasio masukan dan keluaran sedang pada organisasi publik produktivitas dapat diartikan sampai sejauh mana target yang ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik.

3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi.

Tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, akan tetapi pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sudah terangkum dalam hasil penelitian Richard M.Steer, seperti misalnya teori mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan yang berencana dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pendiagnosaan organisasi sebagai salah satu metode pembinaan organisasi menekankan pada hal-hal yang dianggap mempengaruhi ketidakstabilan atau ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Weisbord memberikan model untuk mendiagnosa organisasi yang sering dikenal dengan model enam kotak Weisbord yang terdiri dari :

1. Tujuan;
2. Struktur;
3. Sistem penghargaan;
4. Mekanisme tata kerja;
5. Tata hubungan dan
6. Kepemimpinan. Thoha,(2000:98).

Hal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh keenam unsur diatas, sehingga keenam unsur tersebut perlu

didiagnosa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan organisasi mencapai tujuannya.

Pemahaman terhadap suatu penelitian harus didasarkan atas suatu kerangka kerja analisa yang dipakai sebagai pedoman. Kerangka kerja ini merupakan variabel yang memainkan peranan penting dalam memperlancar terwujudnya keberhasilan organisasi. Menurut Steers (1985:209), kerangka kerja yang dipakai dapat mengidentifikasi empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas, yakni ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerjaan serta kebijakan dan praktek manajemen.

a. Ciri organisasi

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan Sumber Daya Manusia akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Peranan manajer/direktur di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan dan merumuskan

sasaran-sasaran pokok sangat menentukan sebab akan membawa kemajuan-kemajuan di dalam organisasi.

Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi, faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai seberapa jauh para anggota organisasi dapat mengambil keputusan atau diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka. Faktor formalisasi berhubungan terhadap tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungannya yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi itu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Hal diatas berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, karena faktor tersebut menyangkut para pekerja yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika peraturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin. Tanda-tanda organisasi yang baik dan efektif antara lain:

- a. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis;
- b. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas;
- c. Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan;
- d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan;

- e. Unit-unit kerja/departemen bagiannya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan;
- f. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak;
- g. Jenis wewenang (authority) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.

Dalam kaitannya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perumusan sasaran-sasaran pokok seperti rencana stratejik dan upaya-upaya untuk membawa kemajuan-kemajuan lain seperti program kerja dapat terlaksana berkat dukungan serta kerjasama seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengidentifikasi berbagai masalah, mencari alternatif pemecahan, serta merencanakan langkah-langkah yang dapat memajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

b. Ciri Lingkungan

Baik lingkungan ekstem maupun lingkungan intern mempengaruhi efektivitas organisasi. Lingkungan ekstem merupakan semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh lingkungan ekstem meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat ketidakpastian lingkungan. Yang termasuk dalam lingkungan luar antara lain adalah hukum, ekonomi dan pasar di mana organisasi berusaha

mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan keluarannya. Lingkungan intern dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan dalam meliputi kebudayaan dan sosial yang sangat menentukan perilaku kerja.

Ciri lingkungan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungannya. Dalam menentukan tepat-tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan, ada tiga variabel kunci yang dipakai yakni tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalitas organisasi. Dengan arti lain, semakin tepat tanggapannya, maka semakin berhasil kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Pemantauan yang terus-menerus terhadap perubahan lingkungan harus diikuti dengan penyesuaian standar design, teknologi, sasaran dan perilaku organisasi.

Steer (1985:111) menyimpulkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti Lawrence & Lorch (1967), Weick (1969) dan Simon (1957) bahwa keterdugaan, persepsi dan rasionalitas merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan ini terdapat suatu pola dimana tingkat keterdugaan dari keadaan lingkungan disaring oleh para pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketepatan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi.

Berkaitan dengan lingkungan organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas harus memiliki pedoman untuk melakukan pengembangan ke depan dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan lingkungan. Situasi yang berkembang saat ini dan masukan dari satuan kerja yang terkait dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. Perubahan yang terjadi pada lingkungan luar akan mempengaruhi efektivitas organisasi.

c. Ciri Pekerja

Selain ciri organisasi dan ciri lingkungan, pekerja juga mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi sebab lancar atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi tergantung dari kemampuan pekerja sendiri. Kemajemukan yang ada dalam suatu organisasi (*organization diversity*) menggambarkan perbedaan individual di antara pekerja. Perbedaan individual menggambarkan perbedaan di dalam pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan. Hal yang dipengaruhi di dalam pencapaian efektivitas adalah rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya dan prestasi kerja individual.

Katz Kahn (1966) meneliti peranan tingkah laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan tingkah laku yaitu : Pertama, setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap yang terdiri dari pekerja baik pria maupun wanita yang terampil.

Hal ini berarti disamping mengadakan penerimaan dan penempatan pegawai, organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu. Kedua, organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para pekerjanya. Sering terjadi manajer puncak yang seharusnya memikul tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perusahaan, membuang terlalu banyak waktu untuk keputusan dan kegiatan sehari-hari yang sepele dan mungkin menarik akan tetapi tidak relevan dengan peranannya, sehingga berkurangnya waktu yang tersedia bagi kegiatan kearah tujuan yang lebih tepat. Bila sebuah organisasi ingin beroperasi efektif, setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga harus bersedia melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya. Terakhir, disamping prestasi peranan yang dapat diandalkan, organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif. *Job discription* tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena jika terdapat keadaan darurat atau yang luar biasa, individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasi.

Peranan pekerja sangat mempengaruhi proses pencapaian tujuan sebab menyangkut tingkat produktivitas kerja di dalam menghasilkan output. Apabila pekerja bekerja secara produktif dan memperbesar serta memperlancar kemungkinan tercapainya tujuan organisasi, maka efektivitas kerja akan meningkat. Di lain pihak, apabila para pekerja dihadapkan pada situasi dimana

tujuan pribadi mereka bertentangan dengan sasaran organisasi, maka efektivitas kerja akan berkurang. Dalam hal ini, seorang manajer atau direktur sangat berperan dalam memahami perbedaan-perbedaan yang exist di dalam suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan pelayanan, tingkat koordinasi yang efisien dapat memanfaatkan dan mengatur perbedaan individual sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, peranan manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara proporsional untuk mencapai tujuan.

Henry Mintzberg yang dikutip Gibson at.al (1996:33) mengidentifikasi tiga peran utama manajerial: Peran interpersonal, peran pengambil keputusan dan peran informasi. Masing-masing peran mempunyai beberapa aktivitas yang berkaitan yang membedakan satu peran dari lainnya. Aktivitas peran interpersonal dengan jelas melibatkan manajer dengan pihak lain didalam maupun diluar organisasi. Aktivitas peran pengambil keputusan melibatkan manajer dalam membuat keputusan dari sudut operasional, alokasi sumber daya, dan negosiasi dengan unsur-unsur organisasi. Peran informasi akan melibatkan manajer sebagai seorang penerima atau pemberi informasi kepada berbagai individu dan institusi.

Sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berjalan, yang membuat kebijakan itu berjalan adalah bila kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah yang ingin kita tuju. Kebijakan harus dipahami, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis (Michael Armstrong, 1995: 49). Sifat kebijakan tersebut diatas menuntut adanya kontribusi para pelaksana kebijakan dalam penetapannya, karena merekalah yang akan menjadi implementor dari kebijakan dari kebijakan yang telah dibuat. Musyawarah untuk mencapai mupakat diperlukan pula dalam menetapkan suatu kebijakan dalam suatu organisasi. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan dan lalu melaksanakannya melalui orang-orang (Armstrong, 1995:xiii). Definisi ini menekankan bahwa manusia dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting, karena melalui sumber daya inilah sumber daya lainnya seperti pengetahuan, keuangan, peralatan dan sebagainya dapat dikelola.

Begitu pentingnya manajemen bagi organisasi, maka para manajer harus dapat menjadi manajer yang mengerti para pegawainya, menghargai karena tanpa mereka manajer tidak mempunyai arti apa-apa. Kebijakan dan paraktik manajemen ini berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, karena para pekerja dalam organisasi yang menentukan efektif atau tidaknya suatu organisasi dapat digerakkan oleh manajer yang baik untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam kaitannya dengan pelayanan dan sistem administrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas harus mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusi secara optimal dan mengatur sedemikian rupa agar dapat menciptakan lingkungan yang berprestasi.

B. Kajian mengenai Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah unsur pelaksanaan dari tugas Bupati dalam hal penanggulangan Bencana Daerah. Unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh kepala pelaksanaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 tahun 2014 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas pada pasal 5 dan pasal 6. Untuk melaksanakan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana.
- ii. Mengkoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga usaha dan pihak lain diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- iii. Pengkomandoan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.
- iv. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan integritas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan Tugas diatas, pasal 7 yang berbunyi adalah:

1. Merumuskan perencanaan kerja, program, kerjasama, anggaran dan evaluasi;
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Mengelola teknis kesekretariatan;
4. Menyelenggarakan urusan umum;
5. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
6. Menyelenggarakan pusat data dan informasi kebencana;
7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pengarah;
9. Memfasilitaskan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
10. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja kesekretariatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian terdahulu, maka penulis menggunakan referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain agar dapat ditarik suatu kesimpulan, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Said Abd. Rahman	bertujuan untuk mengetahui	Persamaan: peningkatan

<p>(2013)Efektifitas Organisasi Kecamatan Sebagai Salah Satuan Kerja Perangkat daerah (studi Kasus: di kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru)</p>	<p>efektivitas organisasi kecamatan sebagai perangkat daerah dari kemampuan menyesuaikan diri, tingkat produktivitas dan kepuasan kerja dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang dianggap relevan antara lain sumber daya manusia yang dimiliki organisasi kecamatan dan kepemimpinan.</p> <p>Hasil penelitian dan analisis ditentukan bahwa efektivitas organisasi Kecamatan PulauLaut Utara dilihat dari kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan baik internal maupun eksternal organisasi, Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki organisasi kecamatan PulauLaut Utara cukup memadai namun dalam pemanfaatan dan penempatannya belum optimal, ini dapat dilihat dari peran nterpersonal, peran informasional dan decisional.</p>	<p>efektivitas organisasi kecamatan melalui konsistensi pembagian tugas pelayanan sesuai ketentuan uraian tugas.Penyederhanaan prosedur pelayanan melalui pelimpahan wewenang dari abupaten kepada Kecamatan, sehinggaKabupaten cukup bertindak sebagai pembina tehnis dan pengawas.</p> <p>Perbedaannya: dalam penentuan indikator penerlitan dan sumber daya manusi yang sudah memadai atau cukup.</p>
<p>Robert Edwar Kusuma (UGM, 2003) Efektivitas Organisasi DISPENDA Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan efektivitas organisasi melalui peningkatan PAD (Pajak Asli Daerah) yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara proporsional, peningkatan efektivitas organisasi melalui pembenahan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan organisasi Kantor Dispenda, dan perbaikan kemampuan aparatur pemerintah daerah yang berkaitan dengan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan perbaikan insentif bagi karyawan.</p>	<p>a. Persamaan: melihat sudah sesuai belum mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi BpBD dan Analisis data menggunakan analisis regresi berganda</p> <p>b. Perbedaan:variable kedua proses anggaran tidak sesuai dengan kondisi dan kinerja di lapangan</p>
<p>Dyah Chasanah (JUNI, 2016) Efektifitas bahan ajar buku panduan</p>	<p>Karakteristik individu, ekstra Tim Mitigasi Bencana ini dibagi kedalam dua kelompok, yakni</p>	<p>a. Persamaan: terdapat variable individu</p>

<p>pembelajaran bencana Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Pengetahuan bencana gempa Bumi melalui strategis Numberel Heads Together di SMk Muhammadiyah Yogyakarta 2 Kaltan.</p>	<p>kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penilaian pre test dan post tes dari kelas eksperimen, nilai rata-rata pre test kelas eksperimen adalah 78,53 dan nilai rata-rata post test eksperimen 87,26. Hasil nilai dari pre test ke post test mengalami kenaikan sebanyak 8,73%. Kelas kspерimen mengalami peningkatan engetahuannya setelah diberi perlakuan dengan menggunakan strategi NHT. Nilai rata-rata pre test kelas kontrol adalah 75,3 dan nilai rata-rata post test adalah 81,2. Hasil nilai dari pre test ke post test mengalami kenaikan sebanyak 5,9%. Sehingga ada tingkat keefektifan buku panduan kebencanaan terhadap tingkat pengetahuan peserta didik di SMK Muhammadiyah 2 Klaten. Penggunaan strategi NHT dapat mencapai tujuan pembelajaran ,hal ini terbukti dengan terjadinya</p>	<p>dan variable efektivitas organisasi dan Analisis data menggunakan analisis regresi berganda b. Perbedaan:variable kedua pada penelitian terdahulu lebih berpusat pada efektivitasnya</p>
---	---	---

Ada beberapa acuan karya ilmiah yang menjadikan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, beberapa diantaranya adalah:

1. SRIE HARYATI, ZAILI RUSLI, efektivitas BASARNAS Dalam Penanggulangan Bencana dan Musibah di Pekanbaru, Kualitas hidup yang ingin dicapai manusia adalah dengan memiliki kebahagiaan, rasa aman, kesehatan. Apapun kualitas hidup yang ingin dicapai manusia, pada akhirnya alam menjadi sumber utamanya. Materi yang disediakan alam seperti air dan udara merupakan sumber utama hidup manusia. Demikian juga jasa lingkungan, seperti siklus, hutan merupakan layanan gratis dari alam untuk mendukung hidup manusia. Sayangnya sampai saat ini manusia membangun

hidupnya bukan dengan bekerja sama dengan alam, melainkan dengan merusak alam. Akibatnya, sumber penghidupan manusia itu justru menjadi rusak dan selanjutnya mengancam kelangsungan hidup manusia, lewat berbagai bencana yang timbul setelahnya. Kampar memiliki kekayaan alam yang dapat dijadikan sumber utama untuk mencapai kualitas hidup yang diinginkan masyarakat setempat. Dengan memiliki hutan yang luas dan dua buah sungai besar yaitu sungai kampar dan sungai siak. Kekayaan alam tersebut merupakan sumber utama untuk menjaga kelestarian alam. Namun pada kenyataannya sering terjadinya pembalakan hutan secara liar dan penambangan pasir yang merusak kawasan sungai dan rusak nya habitat di sekitar sungai dan hutan. Hutan pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai daerah perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan sedimentasi serta memelihara kesuburan tanah. Sungai memiliki peran penting untuk tangkapan air. Akibat dari eksploitasi hutan dan sungai tersebut semakin sering terjadi bencana banjir yang mengancam keselamatan warga kabupaten kampar dan sekitarnya. Beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Kampar sering di landa bencana banjir, namun kurang tanggapnya penanggulangan bencana menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan koordinasi untuk penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik. Pada situasi darurat sering terjadi kesimpangsiuran informasi yang mengakibatkan mempersulit penanganan. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penangananan, seta pelaksanaan penanganan terkesan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. 2

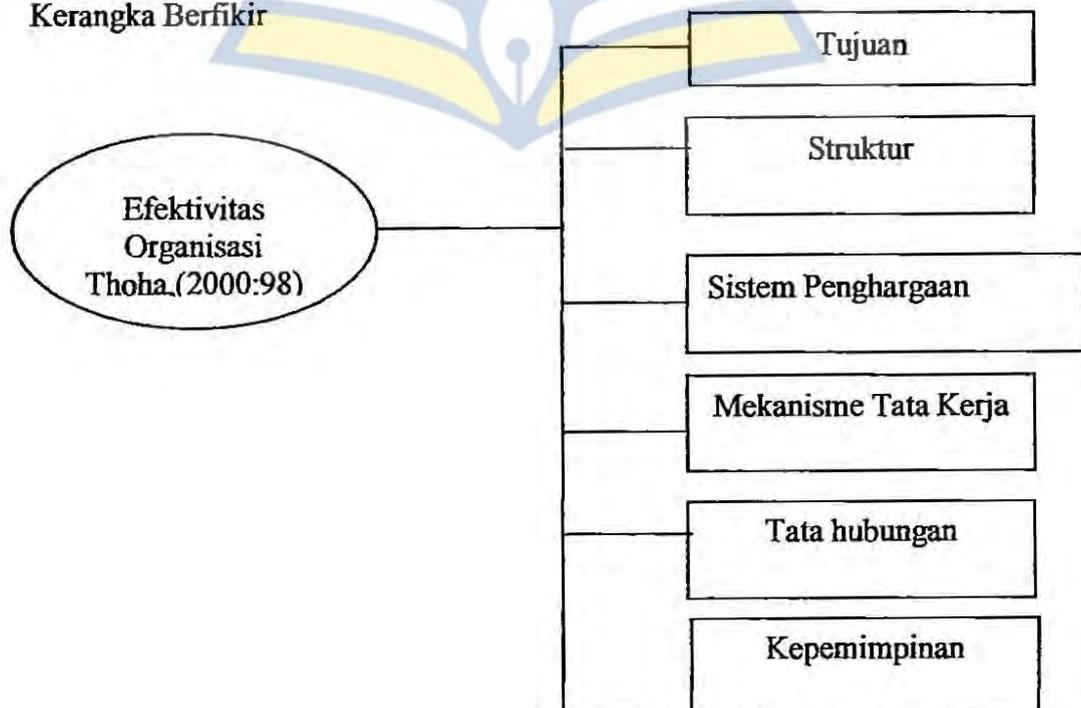
2. Nurkumala Sri, Implementasi Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Maros, Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi tugas dan fungsi, keberadaan, serta faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis *field research* (penelitian lapangan), *library research* dan penelusuran data *on line*. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros belum berjalan dengan optimal dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyebaran luasan peta rawan bencana yang belum terlaksana dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang belum maksimal. Kedua, Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros hampir tidak diketahui oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kegiatan terjun langsung ke masyarakat. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat : Faktor pendukung implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros yaitu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, banyaknya instansi dan organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, pengangkatan ketua badan yang tidak

berdomisili di Kabupaten Maros, sumber daya manusia yang tidak berkompeten dibidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga baru.

D. Kerangka Berpikir

Menurut *Purnomo, dkk. (Mansyuri dan Zainudin, 2008 h. 113)*, kerangka berfikir adalah menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran pemikiran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada efektivitas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dengan melihat tujuan, struktur, sistem penghargaan, mekanisme tata kerja, tata hubungan dan kepemimpinan. Maka tercapainya suatu tujuan organisasi di Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, *adapun* kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15).

Data kuantitatif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk mendukung analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi simpulan fenomena antara variabel bebas dan variabel terganggunanya, yang dalam hal ini merupakan analisis efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi dalam mengemban penanggulangan bencana.

B. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2011 h. 72). *Purposive sampling* adalah penentuan sampel atau informan yang disengaja oleh peneliti karena informan tersebut memiliki

keterkaitan erat dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para *stakeholder* dan instansi pemerintah. Untuk memperoleh data ini dengan melakukan wawancara dan observasi.

Penelitian data skunder, adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penelitian dan harus menyusun kembali menurut masalah yang dihadapinya. Pengklasifikasian lebih berdasarkan pada Efektivitas Penanggulangan Bencana sehingga ditemukan suatu pencapaian hasil dari target yang telah ditetapkan. Data sekunder dihimpun melalui dokumen-dokumen negara maupun media massa.

C. Instrumen Penelitian

Dalam instrumen penelitian ini, melihat indikator-indikator yang dipakai adalah:

- 1) Tujuan organisasi adalah suatu hasil yang sudah di rencanakan oleh organisasi sehingga tercapinnya tujuan ingin dicapai, dengan pencapaian waktu yang sudah di tentukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta.
- 2) Struktur organisasi yang merupakan karakteristik organisasi yaitu merupakan cara organisasi menyusun pegawainya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar individu. Secara singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 3) Sistem Penghargaan pegawai pada BPBD Kabupaten Musi Rawas adalah tingkat pendidikan pegawai, jenjang pendidikan yang telah diikuti menurut jabatannya merupakan karakteristik pekerja yang berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pegawai dari segi kualifikasi pendidikan dalam hubungannya dengan semangat dan dorongan kerja (efektivitas), promosi jabatan, penghargaan, dan lain-lain. Para individu yakni pegawai mempunyai pandangan dan tujuan yang berlainan serta kemampuan yang berbeda pula.
- 4) Mekanisme tata kerja dengan instansi teknis lainnya merupakan karakteristik lingkungan kerja organisasi yang meliputi dan mewakili macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya diukur pada tingkat individual dan yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi.
- 5) Tata Hubungan merupakan suatu perencanaan program kerja masing-masing bagian yang merupakan karakteristik kebijakan dan manajemen. Karena para pimpinan memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan tentang program. Karena kebijakan yang baik dalam perencanaan adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis.
- 6) Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Karena seorang kepemimpinan selalu konsisten dalam rangka mencari jalan pemecah dari suatu persoalan bersama.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut *Nasution (Sugiyono, 2011 h. 226)*, *observasi* adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Selain itu pengamatan merupakan suatu proses yang kompleks. Observasi yang dilakukan dengan cara non partisipan, artinya peneliti hanya mengamati tempat, pelaku, dan kegiatan dalam keadaan yang berlangsung dengan tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan (*Sugiyono, 2011 h. 145*).

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian, yaitu khususnya mengenai efektivitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Wawancara

Menurut *Esterberg* dalam (*Sugiyono, 2011 h. 233*), *interview* atau wawancara adalah proses pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijadikan pedoman dalam melakukan proses wawancara kepada informan penelitian (*Sugiyono, 2011 h. 138*).

Dengan melihat kondisi obyek yang diteliti, maka wawancara mendalam akan dilakukan dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, Sekretaris dan para kepala seksi dan beberapa karyawan/pegawai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang berbentuk tulisan, arsip-arsip, gambar, studi kepustakaan, jurnal ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dengan rumusan ini kita dapat memasukkan notulen rapat, laporan kerja artikel, majalah, surat-surat, iklan dan sebagainya ke dalam pengertian dokumen. Dengan menggunakan teknik ini, penyusunan akan memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berupa laporan-laporan, peraturan daerah, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Adapun dokumen yang bisa membantu dalam menjelaskan penelitian ini antara lain laporan hasil investigasi lapangan tentang potensi bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 dan tahun 2016.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat memudahkan untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh *Miles & Huberman* (*sugiyono, 2011 h. 247*), dengan tahap analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collecting*), yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara mengamati atau observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi;
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), atau penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah diperiksa.
3. Penyajian Data (*Data Display*), adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman;
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclutions Drawing*), meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metedologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Obyek Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan dengan gambaran obyek penelitian ini, yang meliputi sebagai berikut: keadaan geografis, keadaaan demografis, keadaan sosial budaya dan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Rawas.

1. Keadaaan Geografis

Kabupaten Musi Rawas berada di Kawasan bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi $102^{\circ}07'00''$ - $103^{\circ}40'00''$ BT dan $2^{\circ}20'00''$ - $3^{\circ}38'00''$ LS. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakaheuni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Lahat.

Kabupaten Musi Rawas banyak terdapat sungai-sungai besar yang dapat dilayari, sebagian besar sungai-sungai tersebut bermata air dari bukit barisan. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Musi. Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya. Sedangkan jenis satwa seperti harimau, monyet, rusa

dan kijang, ayam hutan dan jenis satwa liar lainnya, merupakan jenis satwa yang sebagian besar masih berada pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Secara administratif wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 (empat belas) kecamatan, dengan luas wilayah mencapai 635.717,15 Ha.

Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Muratara
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu

Pada awalnya Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 21 kecamatan, tahun 2015 terjadi pemekaran kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga Kabupaten Musi Rawas menjadi 14 (empat belas) Kecamatan.

Wilayah yang luas merupakan potensi dan pendukung pembangunan meskipun demikian dengan prasarana, sarana dan fasilitas daerah yang masih sangat terbatas serta pemukiman penduduk yang terpencar dalam kelompok-kelompok kecil merupakan masalah dalam percepatan pembangunan daerah.

2. Topografi

Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi wilayah yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 25–1000 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0,2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah

wilayah dengan kemiringan 0,15%, yaitu seluas lebih kurang 635.717,15 Ha, yang merupakan daerah potensial untuk pertanian. Selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan. Khususnya dibagian barat daerah ini yang termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 (empat) provinsi.

4. Geologi

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi kekayaan alam yang beragam. Selain potensi perkebunan dan pertanian juga memiliki potensi bahan tambang dan galian, terdapat juga minyak bumi, batu bara dan bahan galian golongan C yang potensial adalah marmer, fosfat, batu gamping, andesit dan pasir.

5. Iklim

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis basah dengan kelembaban udara 87,0% dan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,9%. Temperatur maksimum 32,9°C dan temperatur minimum 19,6°C. Sebagai daerah tropis basah, rata-rata curah hujan di Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi berkisar antara 2000 – 2500 mm per tahun dengan bulan kering Juni, Juli, Agustus dan September. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas adalah :

- a. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas \pm 8,05% dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.

- b. *Litosol* seluas $\pm 7,17\%$ dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
- c. *Asosiasi Latisol* hanya seluas $\pm 0,77\%$ dari luas kabupaten, terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
- d. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana $\pm 55,89\%$ berada di Kecamatan Muara Beliti dan $\pm 13,34\%$, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.
- e. *Podsolik* seluas $\pm 37,72\%$ dari luas kabupaten, merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
- f. *Asosiasi Podsolik* hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan, dengan luas $\pm 29,59\%$ dari luas wilayah kabupaten.

Pada musim penghujan terjadi genangan air yang cukup luas di wilayah kawasan Kecamatan Muara Kelingi pada musim kemarau air menjadi sulit untuk diperoleh dan sering terjadi kebakaran karena gesekan daun-daun kering (kebakaran mekanis) mau pun akibat kelalaian perambah hutan.

Curah hujan rata-rata Kabupaten Musi Rawas curah hujan antara 2500 s/d 3500 mm pertahun kelembapan udara rata-rata 87,00% mm tahun dan rata-rata hari hujan berkisar antara 90-120 hari tahun. Kecepatan angin rata-rata 3,8 m detik. Tingkat kelembapan udara di wilayah Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi karena dipengaruhi oleh iklim tropis basah, sehingga kelembapan rata-rata berkisar 76-88%.

Potensi-potensi Kabupaten Musi Rawas

Lahan sesuai tanaman pangan	:	631.104 ha
Lahan sesuai tanaman keras	:	1.873377 ha
Rawa	:	337.744 ha
Kawasan lindung	:	1.842 ha
Hutan produksi terbatas	:	26.480 ha
Hutan produksi dikonversi	:	50.072 ha
Hutan rawa	:	700.000 ha
Potensi sumber perikanan	:	6.300,43 ton/th
Potensi areal pengembangan ternak	:	Identik dengan luas potensi tanaman pangan
Potensi pariwisata	:	Salah satu obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bukit Congong : Terletak disebelah tenggara kota dan merupakan satu tempat rekreasi. Dari puncaknya anda dapat menyaksikan seluruh wajah kota. ➤ Danau Aur terletak di Kecamatan Sumber Harta ➤ Danau gegas terletak di Kecamatan Sukakarya

Potensi hutan berupa kayu kurang lebih 80% dari luas wilayah dengan hasil hutan terdiri dari sagu, damar, rotan, gambir, kayu putih, kayu lawang, kayu mahoni, melinjau, mangrove, aneka ragam jenis anggrek, pandan dan rumput rawa yang berpotensi sebagai bahan dasar anyam-anyaman dan masih banyak lagi jenis kayu potensial yang tersebar berkelompok, tidak merata di hutan Musi Rawas.

Jenis fauna yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari jenis-jenis lokal (*endemic*) dan *ecsotic* (berasal dari luar). Adapun jenis *endemic* yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan hias ikan gabus asli Musi Rawas. Jenis-jenis reptil seperti ular, buaya, biawak, kura-kura. Burung berkicau maupun hias seperti kakatua, nuri, beo, burung emas, hutan, ayam beroga, walet, elang, kutilang, bangau, bebek rawa, belibis dan sebagainya. Jenis burung imigran seperti pelikan, boha dan beberapa jenis bebek. Selain itu ada berbagai jenis kuskus, tuban tikus tanah, babi hutan yang merupakan spesies khusus hutan Musi Rawas.

Jenis *eksotic* flora maupun fauna yang lain yakni ikan gabus toraja, ikan mas, ikan betik, ikan nila, keong mas, bekicot dan rusa

5. Demografis

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada akhir 2016 berjumlah 407.375 Jiwa dengan rincian laki-laki 210.067 jiwa dan wanita 197.308 jiwa. Pertambahan penduduk dalam 3 tahun terakhir rata-rata 1,34% per tahun dengan tingkat kepadatan penduduk 2,67 jiwa km². Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas, antara lain karena Kabupaten Musi Rawas merupakan salah-satu daerah penerima transmigran terbesar di Sumatra Selatan

Percepatan pertambahan penduduk sampai saat ini belum diimbangi dengan percepatan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Angka pertambahan tenaga kerja pencari kerja terus menunjukkan pengangguran yang terbuka.

Secara etnografi suku-suku bangsa yang ada di Kabupaten Musi Rawas sangat banyak yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Penduduk Asli yang terdiri dari Suku Babat adalah sebuah desa di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Desa ini terletak di sebelah sungai lakitan yang jernih, dilewati Jalan Lintas Sumatera berdampingan dengan kecamatan terawas juga berada sangat strategis 3 Km dari Pasar Distrik Agropolitan Center Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- b) Pendatang yang terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Perbedaan suku dan etnis tidak terlalu menjadi masalah, kebersamaan dan kekeluargaan masih selalu diwujudkannyatakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pendatang yang terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Perbedaan suku dan etnis tidak terlalu menjadi masalah, kebersamaan dan kekeluargaan masih selalu diwujudkannyatakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

6. Agama

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Rawas menganut agama Islam merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan iman dan moral masyarakat dan memenuhi salah satu hak dasar rakyat, hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Untuk Kabupaten Musi Rawas, ada beberapa permasalahan pembangunan beragama yang dihadapi:

1. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masih kurang memadai. Agama masih dipandang sebagai sumber

ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dibanding hubungan antar manusia;

2. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial atau yang lebih dikenal dengan ritual belaka;
3. Sarana dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektifnya pengelolaan dana sosial keagamaan;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama diikuti dengan kurangnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik.

7. Sosial Budaya

Kabupaten Musi Rawas menghadapi berberapa permasalahan dibidang sosial budaya, yaitu:

1. Masih tingginya sikap (norma) individualisme dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Rendahnya apresiasi terhadap produk budaya lokal dan banyak budaya lokal yang mulai menghilang;
3. Belum adanya konsep, kebijakan, dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah. Dan masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing;
4. Media massa belum dimanfaatkan dalam upaya pembentukan watak dan jati diri daerah;
5. Belum adanya pedoman dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kebudayaan;

6. Pembangunan harus dapat menjangkau seluruh strata sosial yang ada di masyarakat di seluruh pelosok wilayah kabupaten Musi Rawas tanpa dipengaruhi oleh pilihan partai politik masyarakat tersebut;
7. Data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional dan hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal;
8. Upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa diselesaikan melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Musi Rawas 2014-2015

NO	Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin	Presentase %
1.	2014	97.000	17,28%
2.	2015	58.010	15,13%

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Musi Rawas tahun 2014 menunjukkan, jumlah keluarga fakir miskin di Musi Rawas tercatat 97.000 jiwa dari total penduduk yang ada saat itu 407.375 jiwa. Itu artinya presentase jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 30% dari total penduduk. Sementara pada tahun 2015, menurut angka BPS Musi Rawas tahun 2015 yang dilansir pada Agustus 2016 lalu, jumlah keluarga fakir miskin hanya tinggal 58.010 jiwa, Dengan jumlah total penduduk pada tahun 2015 sebanyak 407.375 jiwa, maka angka kemiskinan di daerah ini pada 2015 hanya tinggal sebesar 0,79%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Periode 2014-2015, diharapkan kondisi Kabupaten Musi Rawas dapat mencapai kondisi sebagai proses pembangunan yang ada telah menyentuh golongan bawah dan kondisi ekonomi (pendapatan) masyarakat semakin membaik, sehingga dengan sendirinya jumlah penduduk miskin berkurang dan semua desa dapat melepaskan diri dari ketertinggalan. Program Pemerintah telah nyata dilaksanakan terutama dalam pengentasan kemiskinan masyarakat yang merupakan salah satu 'momok' bagi daerah berkembang. Meningkatnya keterampilan masyarakat khususnya golongan menengah bawah, sehingga kesempatan kerja dan berusaha semakin terbuka bagi masyarakat miskin. Mudah-mudahan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi, dan air bersih, serta adanya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

Peningkatan peranan wanita belum dapat diusahakan secara maksimal yang antara lain disebabkan karena keterikatan terhadap budaya dan rendahnya pendidikan. Organisasi-organisasi kewanitaan yang ada masih dalam tahap pembinaan. Tuntutan kebutuhan peningkatan pembinaan peranan pemuda dan olah raga belum dapat diusahakan secara optimal oleh Pemerintah dan masyarakat. Prasarana dan sarana pembinaan yang tersedia masih terbatas serta penyebarannya belum merata keseluruh daerah sehingga masih dibutuhkan peningkatan pembangunannya.

8. Pengembangan Wilayah

Tabel 4.2 Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2014-2015

No	Jumlah Wilayah	Kecamatan/kelurahan dan Desa
1	14	Kecamatan
2	13	Kelurahan
3	186	Desa

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas

Wilayah Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri dari 14 Kecamatan, 13 Kelurahan 186 desa dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pembangunan, Wilayah Khusus Perbatasan, Kecamatan Fokus, Kawasan-kawasan Strategis agar dicapai efisiensi dan efektifitas dalam pengembangannya.

Sampai dengan akhir Pelita IV, pembagian wilayah dimaksud dapat dikelompokkan dalam:

1. Wilayah Pembangunan yang terdiri dari
 - 1.1. Wilayah Pembangunan I yang berpusat di Kabupaten Musi Rawas, meliputi Kecamatan Tugumulyo, Selangit, Tiang Pumpung Kepungut, Sumber Harta, Purwodadi, STL, Ulu Terawas ;
 - 1.2. Wilayah Pembangunan II yang berpusat di Kabupaten Musi Rawas, meliputi Megang Sakti, Sukakarya, Tuah Negeri;
 - 1.3. Wilayah Pembangunan III yang berpusat di Kabupaten Musi Rawas, meliputi Kecamatan Muara Lakitan, Mura Kelingi, Jayaloka;
 - 1.4. Wilayah Pembangunan IV yang berpusat di Kabupaten Musi Rawas, meliputi Kecamatan, BTS Ulu Ulu Cekar.
2. Wilayah Khusus Perbatasan yang meliputi wilayah Kecamatan Kabupaten Musi Rawas, Muara Lakitan, Muara Beliti.
3. Kecamatan Fokus Pengembangan Wilayah Agro Politan Center yang meliputi Kecamatan Muara Beliti.
4. Kawasan-kawasan Strategis yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Industri.
5. Kawasan Tertinggal dan Terpencil

Masalah yang dihadapi dalam rangka pengembangan wilayah, adalah kondisi geografis yang sangat berat dengan aksesibilitas yang rendah sedangkan prasarana dan sarana yang tersedia masih sangat terbatas sehingga mempersulit jangkauan dalam pengembangan wilayah, terbatasnya kemampuan daerah dalam pembiayaan mengakibatkan sulit untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan wilayah yang sangat luas ini. Demikian pula kondisi demografis yang terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan yang masih rendah, merupakan salah satu kendala yang patut diperhitungkan dalam rangka pemekaran dan pengembangan wilayah.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

potensi kekayaan alam yang beragam. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Peranan sumber daya alam dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB yang pada tahun 2010 mencapai di atas 78% dan penyerapan tenaga kerja mencapai di atas 80%. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas terkait dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu:

1. Keberlanjutan atas ketersediaan Sumber Daya Alam sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis;
2. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya bencana alam;
3. Potensi dan Keragaman Sumber Daya Alam dan ekosistem alam belum dikelola secara bijaksana untuk kepentingan pendidikan, penelitian, obat-obatan, pariwisata, dll;
4. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan;

5. Belum ada sistem pengolahan limbah secara terpadu, baik limbah padat, limbah cair (domestik maupun industri) dan limbah gas dari beberapa penampungan dan pengolahan industri dan agroindustri;
6. Kabupaten Musi Rawas belum memiliki TPA, TPS dan pengelolaan persampahan secara terpadu, masih banyaknya pengelolaan sampah yang dilakukan secara individual setiap rumah tangga dengan cara ditimbun/ dibakar dan dibuang kesungai, parit dan saluran irigasi;
7. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan;
8. Belum diterapkannya peraturan lingkungan hidup dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

Menghadapi kondisi ini, tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Musi Rawas adalah dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada terkait dengan terganggunya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan keanekaragaman hayati sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari;
2. Terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan secara bijaksana dan optimal;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting pelestarian lingkungan hidup. Sehingga gaya hidup menjadi bijaksana dan dapat menerapkan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan dan dalam kehidupan sehari-hari dapat menerapkan prinsip 3R (*reuse, reduce, recyle*);

4. Perubahan iklim dan pemanasan global dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan. Isu lingkungan global mulai diterapkan dalam pembangunan daerah;
5. Dampak negatif seluruh pembangunan menjadi minimal karena telah mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan seluruh kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting harus dilakukan AMDAL secara baik;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah, pengolahan limbah dan ter kendalinya berbagai sumber pencemaran lingkungan;
7. Terwujudnya pengolahan sampah secara terpadu (*integrated*) baik di wilayah Perkotaan maupun pedesaan yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran penduduk tentang kebersihan lingkungan dan persampahan

10. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari indikator perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ketahun. Begitu pula halnya dengan keadaan sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi disuatu daerah. Perekonomian Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 secara keseluruhan cenderung lebih baik dibanding tahun 2014 hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 5,21 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar

6,12%. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi kabupaten ini adalah sektor bangunan, ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur dasar untuk membuka akses ke daerah terpencil. Secara sektoral pada tahun 2012 beberapa sektor mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi diatas 5% yaitu: sektor bangunan dengan pertumbuhan sebesar 7,17%, angkutan dan komunikasi sebesar 6,76%, pertanian sebesar 6,39%, listrik, gas dan air sebesar 6,27%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,24% dan sektor industri pengolahan sebesar 5,49% serta sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,22%, sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hanya tumbuh sebesar 4.17% bahkan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh sebesar 3,78%

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2013-2015 (dalam persen)

SEKTOR	2013	2014	2015	Rata-rata
3. Sektor Pertanian	6.20	7.11	6.39	3.94
4. Sektor Pertambangan dan Penggalian	2.41	3.36	3.78	1.91
5. Sektor Industri Pengolahan	6.88	6.67	5.49	3.81
6. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	6.11	6.80	6.27	3.84
7. Sektor Bangunan	2.34	3.34	7.17	2.57
8. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.09	5.09	6.24	3.08
9. Sektor Angkutan dan Komunikasi	7.18	6.40	6.76	4.07
10. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.44	4.94	4.17	2.91
11. Sektor Jasa-jasa	5.41	4.64	5.22	3.05
PDRB dengan Migas	4.42	5.17	5.21	2.96

Sumber: PDRB Kabupaten Musi Rawas 2013, BPS Kabupaten Musi Rawas, 2013-2015

B. Organisasi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas

1. Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sejarah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, tidak terlepas dari perkembangan dalam penanggulangan bencana penanggulangan bencana alam (PBA). Selanjutnya pada tahun 2008 terjadi terjadi penataan kembali menjadi bidang bencana bergabung dengan Badan Kesbang Pol dan Linmas. Seiring dengan tuntutan tugas pemerintah bidang penanggulangan bencana yang semakin berat dibidang penanggulangan bencana, Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Musi Rawas dimekarkan menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 11 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan menimbang berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten. Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan struktur organisasi tentang pembentukan dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana.

Sedangkan susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai mana di maksud terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Gambar 4.1 Photo Kantor BPBD Kabupaten Musi Rawas.



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas 2017.

2. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Adapun visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dinyatakan dalam pernyataan: ***“Menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Yang Profesional Untuk Mewujudkan Masyarakat Musi Rawas Yang Tangguh Menghadapi Bencana”***.

Sedangkan misi adalah cara yang harus dilakukan oleh Badan untuk mencapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana;
2. Melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan risiko bencana;
3. Menyelenggarakan kerjasama antar-pihak dalam penanggulangan bencana;
4. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

Penjelasan makna Misi

1. Misi Pertama

“Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tangkap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara”.Penanggulangan Bencana

diselenggarakan guna memberikan pedoman dan pengarahan kepada pemerintah maupun masyarakat dalam pencegahan bencana, penanganan terhadap darurat terhadap bencana, rehabilitasi terhadap tempat terjadinya bencana maupun korban bencana, dan rekonstruksi terhadap terjadinya bencana secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat ditempat terjadinya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berusaha untuk memberikan acuan berupa pedoman dan pengarahan penanggulangan bencana agar penanggulangan bencana lebih terarah, efisien dan tepat sasaran.

2. Misi Kedua

“Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat” Dalam misi ini diarahkan agar kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat mengalami pergeseran. Selama ini masyarakat hanya sebagai objek penanggulangan bencana maka diharapkan secara berangsur terjadi perubahan yaitu masyarakat sebagai subjek atau penggerak penanggulangan bencana ditempatnya sendiri melalui informasi yang diberikan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya penanggulangan bencana, maka kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana akan meningkat juga. Dengan kesadaran ini akan menimbulkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama melanggulangi bencana didaerahnya masing-masing.

3. Misi Ketiga

“Melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan resiko bencana”

Dalam misi ketiga ini, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dari bencana dengan cara memanfaatkan daya manusia yang ada, peralatan logistik yang tersedia guna mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana.

4. Misi Keempat

“Menyelenggarakan Kerjasama antar pihak dalam penanggulangan bencana”

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan kerjasama antar SKPD, Lembaga Swadaya masyarakat yang ada atau pihak masyarakat itu sendiri dalam upaya dalam penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana. Dengan demikian diharapkan semua pihak memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang penuh secara bersama dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Musi Rawas.

5. Misi Kelima

“Membangun Sistem penanggulangan bencana yang handal” Dalam melaksanakan misi kelima ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

mealalui penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Misi Keenam

“Menyelenggarakan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh”Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berupaya merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh guna menangani keadaan bencana yang terjadi baik sebelum bencana, saat bencana dan setelah terjadinya bencana guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana.

3. Tujuan dan Sasaran

3.1. Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan: 8 pembangunan kebencanaan yang diselenggara kan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan umum;
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan efektifitas penanganan kejadian darurat;
4. Mengelola data dan informasi bencana;
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
6. Mengurangi kerentanan masyarakat;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana;

8. Meningkatkan kualitas sistem peringatan dini (early warning system);
9. Meningkatkan ketersediaan peta resiko bencana;
10. Mewujudkan ketersediaan regulasi penanggulangan bencana;
11. Mengembalikan penghidupan dan kehidupan masyarakat pada keadaan sebelum bencana;
12. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana;
13. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan komunitas Peduli Bencana.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah bencana
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Tercapinya program-program kerja

4. Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mengurangi bencana di Kabupaten Musi Rawas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. Secara teknis terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, yaitu:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitas dan Rekonstruksi.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana;
- b. Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- c. Pengkomandoan pengarahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- d. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan integritasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada seksi-seksi, Pengelolaan administrasi umum, Tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan perencanaan kerja, program, kerjasama, anggaran dan evaluasi;
- b. Mengelola administrasi keuangan;
- c. Mengelola teknis kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pusat data dan informasi kebencanaan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- j. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan pemadam bencana kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan bencana serta Penanganan pemadam kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Menyiapkan bahasan rumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Menyelenggarakan, pembinaan, pengkoordinasian penanganan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- d. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemadam kebakaran;
- e. Merumuskan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
- f. Menyelenggarakan dan membina pelayanan pemadam kebakaran;
- g. Menyelenggarakan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- h. Menyelenggarakan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknik kedaruratan dan operasional;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. Menyelenggarakan dan Mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan logistik bencana;
- e. Mevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanganan bencana;

- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanganan bencana;
- d. Mevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Jenis – Jenis Bencana Alam

Jenis-jenis ancaman bahaya yang terdapat di wilayah Kabupaten Musi Rawas

5.1. Tanah longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Pemicu dari terjadinya gerakan tanah ini adalah curah hujan yang tinggi serta kelerengan tebing.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Musi Rawas yang mengakibatkan kerugian harta benda walaupun sampai saat ini bencana tanah longsor di Kabupaten Musi Rawas belum menimbulkan korban jiwa. Untuk itu perlu di tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis bencana ini.

5.2. Banjir

Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah, dengan ketinggian melebihi batas normal. Kabupaten Musi Rawas termasuk daerah rawan bencana banjir, Bencana banjir terjadi sebagai akibat akumulasi

beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya.

Potensi terjadi ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini di sebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah.

5.3. Kebakaran

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Rawas cukup besar. Hampir setiap musim kemarau Kabupaten Musi Rawas menghadapi bahaya kebakaran lahan dan hutan di mana berdampak sangat luas tidak hanya kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga timbulnya gangguan asap di wilayah sekitar yang sering mengganggu negara-negara tetangga.

Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ketahun selalu terjadi. Hal tersebut memang berkait dengan banyak hal. Dari ladang berpindah sampai penggunaan HPH yang kurang bertanggung jawab, yaitu penggarapan lahan dengan cara pembakaran, Hal ini yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah kondisi tanah di darah banyak yang mengandung gambut. Tanah semacam ini pada waktu dan kondisi tertentu kadang-kadang terbakar dengan sendirinya.

5.4. Kekeringan

Bahaya kekeringan di alami berbagai wilayah di Kabupaten Musi Rawas hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan menurunnya fungsi lahan

dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut di tenggarai akibat rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi.

5.5. Epedemi dan Wabah Penyakit

Wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Epedemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya epedemi seperti avian influenza/flu burung serta beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian bagi petani.

5.6. Kebakaran Gedung dan Pemukiman

Kebakaran gedung dan pemukiman penduduk sangat marak pada musim kemarau. Hal ini terkait dengan kecerobohan manusia di antaranya pembangunan gedung/rumah yang tidak mengikuti standar keamanan bangunan serta perilaku manusia. Hubungan arus pendek listrik, meledaknya kompor serta kobaran api akibat lilin/lentera untuk penerangan merupakan sebab umum kejadian kebakaran pemukiman/gedung.

6.Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4 peralatan RescueBPBD Kabupaten Musi Rawas

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Mobil ranger	1	
2	Mobil ambulance	-	
3	Motor trail	4	
4	Pelampung	10 buah	
5	Valbet	45 Pps	
6	Perahu karet	1 unit	
7	Water treatment	1 unit	
8	Genset	3 unit	
9	Tenda keluarga	7 pcs	
10	Tenda posko	1 unit	
11	Tenda pengungsi	2 pcs	
12	Mesin pompa	5 unit	
13	Pelampung pompa air	10 buah	
14	HT	5 unit	
15	RIG	5 unit	
16	SSB	3 unit	
17	Kaca mata berenang	5 unit	
18	Matras	10 buah	

Sumber data: Bagian Logistik BPBD Kabupaten Musi Rawas.

7.Data Kejadaian Bencana

Tabel.4.5 Laporan Kejadian Bencana Diwilayah Kab. Musi Rawas Tahun 2016

No	Tanggal	Lokasi	Jenis Bencana	Kerugian
1.	17 Januari 2016	Kel.Kelinggi Kec. Muara Kelinggi	Banjir	Dalam bentuk Materi
2	17 januari 2016	Kel. Lakitan dan Prabumulih Kec. Muara laiktan	Banjir	Dalam bentuk Materi
3	18 januari 2016	Desa jajaran baru dan Muara Megang Kec. Megang Sakti	Banjir	Dalam bentuk Materi
4	1 febuari 2016	Sambatu Jaya dan lubuk pauh Kec.BTS Ulu Cecar	Banjir	Dalam bentuk Materi
5	14 Febuari 2016	Desa Semangus Kec. Lakitan	Kebakaran Rumah	Dalam bentuk Materi
6	29 Febuari 2016	Kel. Kelinggi kec. Muara Lakitan	Banjir	Dalam bentuk Materi
7	29 Febuari 2016	Kel. Lakitan Kec. Muara Lakitan	Banjir	Dalam bentuk Materi
8	29 Febuari 2016	Kecamatan Sumber Harta	Banjir	Dalam bentuk Materi
9	Maret 2016	-	-	-
10	April 2016	-	-	-
11	15 Mei 2016	Desa Lubuk Rumbai Kec.	Kebakaran rumah	Dalam bentuk Materi

		Tuah Negeri		
12	Juni 2016	-	-	-
13	Juli 2016	-	-	-
14	12 Agustus 2016	Desa Beliti kec. Muara Beliti	Kebakaran Lahan 2 Hektar	Dalam bentuk Materi
15	4 September 2016	Desa Muara Kati Kec. Tiang Kepunggut	Kebakaran Lahan 3 hektar	Dalam bentuk Materi
16	15 September 2016	Desa Bamasco kec. Tua Negeri	Puting Beliung	Kerisakan Rumah sebanyak 193 KK
17	16 Oktober 2016	Desa Bangun jaya (SP 9 cecar) Kec. BTS Ulu Cecar	Kebakaran Rumah	Dalam bentuk Materi
18	27 oktober 2016	Desa rantau sirik kec. Ting pumpung kepunggut	Banjir	Dalam bentuk Materi
19	27 oktober 2016	Desa menggang sakti Kec. Mengang sakti	Banjir	Dalam bentuk Materi
20	27 oktober 2016	Desa Prabu mulih kec. Muara lakitan	Perahu karam	30 juta rupiah
21	27 oktober 2016	Desa sukakarya kec. STL ULU Terawas	Banjir	Dalam bentuk Materi
22	27 oktober 2016	Desa suka karya STL ULU Terawas	Banjir	Dalam bentuk Materi
23	28 oktober 2016	Desa Lubuk nggin Kec.	Banjir dan Jambatan	Dalam bentuk Materi

		Terawas	Amlas	
24	17 november 2016	Desa Sembatu jaya Kec. BTS Ulu Cekar	Banjir	Dalam bentuk Materi
25	22 november 2016	Desa Lubuk padang Kec. Muara Lakitan	Banjir	Dalam bentuk Materi
26	24 november 2016	Desa Muara Megang Kec. Megang Sakti	Banjir	Dalam bentuk Materi

Sember Data: BPBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2016

C. Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Musi Rawas.

Tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas akan dianalisis berdasarkan dimensi atau ukuran yang telah dikemukakan pada bagian definisi operasional (Bab II). Analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk tabel dan untuk memperkaya informasi atas fenomena organisasional ini, maka data kualitatif dari hasil wawancara (*depth interview*) agar dipergunakan sebagai pelengkap.

Hasil analisis dan pembahasan yang dapat dilakukan terhadap kinerja efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan unit analisis yang ada dan menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas yang dicapai.

Pengukuran efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dilakukan berdasarkan rumusan serta indikator yang telah

dibahas pada bab landasan teori yang dipotret pada keadaan empiris yang terjadi pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas beserta kinerja serta *output* yang telah dihasilkan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai instansi yang melakukan penanganan bencana, beberapa warga masyarakat yang sering terkena di daerah Kabupaten Musi Rawas.

Hasil analisis terhadap kinerja efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan ukuran-ukuran dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Pada tataran indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam studi kasus tujuan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah diukur dari sejauh dengan melihat tiga indikator yang terjadi di lapangan mengenai akuntabilitas, rensponsibilitas dan struktur pembagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Oleh karena konsep tujuan lebih berorientasi pada tingkat kinerja sesuai dengan visi dan misi yang dihasilkan pada tataran mutu yang dapat diterima oleh pemberi mandat dan hal itu dapat memenuhi target kinerja yang dimaksudkan, maka analisis yang digunakan pada ukuran tujuan ini dalam 2 tahun terakhir yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri:

- a. dari Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana;
- c. Sekretaris;
- d. 3 (tiga) Kepala Seksi.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi koordinasi

Fungsi fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas di laksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang di perlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

b. Fungsi pengomadoan

Merupakan fungsi komando unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang di perlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

c. Fungsi pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas di laksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas diatas tentang Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawasi. Maka kebijakan yang telah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan atau program kegiatan yang dipertanggungjawabkan pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan penulis dari Kabupaten Musi Rawas mengenai kegiatan dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah

dilakukan apakah sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, apakah konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menurut informasi yang penulis dapat, masih belum yang diharapkan. Karena faktor wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas yang sangat luas.

Bila dilihat dari tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka tugas dan fungsinya dibutuhkan suatu kreativitas kerja yang baik dan handal dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apalagi pada era otonomi kala ini telah didukung dengan dana anggaran yang cukup menjanjikan yang telah dinaikkan dari masa sebelumnya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2016 maka ditetapkan capaian kinerja dalam bentuk indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, dengan capaian kerja sebagai berikut :

Tabel 4.6 capaian kinerja BPBD pada tahun 2016- 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 %	98,63%
2	Peralatan yang dimiliki	75%	83,85%
3	Informasi Wilayah Potensi Bencana Alam	65%	95,55 %

Sumber data: LKJIP BPBD Kabupaten Musi Rawas 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwacapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % dengan capaian 98,63%, sedangkang Peralatan yang dimiliki 75% denan capaian 83,85%, karena disebabkan oleh mobil dan alat-alat yang lain kurang banyak seperti mobil pemadam kebakaran dan Informasi Wilayah Potensi Bencana Alam target 65% realisasi 95,55 %. Dari data ini menunjukkan tujuan yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Sudah cukup maksimal sesuai dengan pencapaian terhadap taget.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan mengatakan bahwa :
“Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat dilakukan sesuai dengan apa yang di harapkan, karena tugas dan fungsi yang telah dilakukan bertujuan untuk tercapainya sasaran organisasi. Sejauh tidak bertentangan dengan aturan dan tugas yang diembankan, dengan tugas dan fungsi adalah permasalahan yang belum jelas surat tersebut maka misi organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Hanbatan yang diterima dalam pelaksanaan. Tugas dan fungsi adalah permasalahan yang belum jelas koordinasi dan komunikasi yang lemah.Usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan disiplin, mengarahkan beban tugas untuk mencapai sasaran serta pengawasan dan diklat. Keluasaan dalam berkerja tetap mangacu kepada tugas dan fungsi sedangkan berkerasi adalah inovasi di dalam mencapai sasaran organisasi.”

Dari penjelasan tersebut di atas, dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan memang dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja pegawai terlihat dari program yang sesuai dengan perencanaan strategi dengan akuntabilitas,

sehingga tercapainya suatu tujuan yang efektif dan efisien di dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Hambatan yang terjadi dilapangan berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara adalah sistem koordinasi dan komunikasi yang kurang dalam menjalankan perkerjaan dan masalah yang terjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga strategi pemimpin dalam lemahnya sistem koordinasi dan komunikasi dilakukan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan tingkat kedisiplinan dan motivasi kepada pegawai.

Dengan melihat masalah yang terjadi mengenai pengembangan kinerja pegawai pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas., menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah:

“Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat dilakukan, karena seluruh jabatan yang ada sudah tradisi sehingga bisa mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan dalam tercapainya tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam berkerja untuk mendukung visi dan misi yang diembankan oleh organisasi. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan contohnya komputer. Usaha-usaha yang sering dilakukan untuk peningkatan kinerja rapat Staf untuk mengevaluasi program dan kegiatan, memberikan honorer bagi staf pelaksanaan kegiatan, memberikan penghargaan dan hukuman. Keluasaan dalam

berkerja pada masa otonomi daerah yaitu dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketua tim untuk merancang waktu pelaksanaan dan memaksimalkan personil”¹

Dari penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan memang dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tingginya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diberikan penghargaan terhadap kinerja yang baik.

Dengan melihat masalah yang terjadi mengenai pengembangan kinerja pegawai pada tugas dan fungsi, Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Pak Paisol, S.Sos adalah:

“Kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas selalu melaksanakan penanganan bencana sesuai tugas pokok dan fungsi kami. Hambatan birokrasi dan jarak kecamatan, Desa/ Kelurahan yang masih jauh sistem pengembangan program pemerintah daerah. Peningkatan kinerja yang dilakukan adalah disiplin, koordinasi dan mengikuti peraturan yang ada. Tapi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan peralatan terbatas kita berusaha untuk menjalankan pekerjaan sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Alhamdulillah kinerja kami dalam dua tahun ini sudah terlihat walupun masih ada kekurangannya.”
(Hasil Wawancara dengan Bapak Faisol, S.Sos 20/04/2017. Jam 13.05)

Dari penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan memang terdapat peningkatan kinerja berdasarkan kedisiplinan, koordinasi dan mentaati aturan yang ada. Walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Peralatan yang masih terbatas.

wilyah dan sistem yang dipakai di dalam pemerintahan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan sistem sentralistik.

2. Struktur

Struktur Organisasi adalah kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas itu sendiri yang merupakan ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi dan menurut Miles maupun Handoko memiliki lima unsur:

- a. Spesialisasi Kegiatan
- b. Standarisasi Kegiatan
- c. Koordinasi Kegiatan
- d. Sentralisasi dan Desentralisasi Pengambilan Keputusan
- e. Ukuran Satuan Kerja.

Jadi struktur merupakan susunan formal dan mekanisme dengan mana organisasi dikelola sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen, bagian-bagian, fungsi-fungsi, kegiatan-kegiatan dari posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja.

Dari struktur organisasi maka ada 5 (lima) aspek utama struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Pembagian kerja menunjukkan tanggungjawab atau satuan organisasi untuk bidang tertentu dari beban kerja organisasi.

- b. Pimpinan dan bawahan: Garis menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari jenjang organisasi yang tertinggi sampai karyawan terendah dalam suatu organisasi mempunyai suatu kaitan dengan pimpinan puncak organisasi. Dalam hal ini prinsip garis komando harus jelas, dimana seorang bawahan menerima tugas dan pelimpahan wewenang dari pimpinannya dan melaporkan pertanggungjawaban kepada pimpinannya.
- c. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan: Label atau deskripsi pada setiap kotak menunjukkan pekerjaan atau tugas-tugas pekerjaan dan tanggungjawab yang berbeda
- d. Pengelompokan bagian-bagian kerja: Keseluruhan bagan organisasi menunjukkan dasar pembagian kegiatan organisasi, misalnya atas dasar fungsional atau divisional atau lainnya (departementalisasi).
- e. Tingkat manajemen: Sebuah bagan tidak hanya menunjukkan pimpinan dan bawahan, tetapi juga hirarki manajemen secara keseluruhan.

Struktur Organisasi dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan karakteristik organisasi, karena dengan struktur organisasi maka orang-orang dapat disusun atau diatur untuk dapat menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan antar pribadi serta pengaturan pemanfaatan teknologi guna pencapaian tujuan yang efisien dan efektif, serta menempatkan karyawannya pada organisasi tersebut berdasarkan spesialisasinya. Pada struktur organisasi diadakan untuk bekerjanya organisasi tersebut dan bagi pemeliharaannya, dimaksudkan pula pembagian dari

peranan-peranan didalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang dan sistem komunikasi, komitmen dari orang-orang pada doktrin dan program dari organisasi tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogramkan.

Adanya sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta tingkat interaksi antar bagian kerja akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Jadi secara singkat struktur organisasi melihat cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan dengan cepat tepat waktu serta efisien dan efektif.

2.1. Penempatan individu sesuai jabatan dengan pendidikannya

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 berjumlah 59 orang, untuk lebih jelasnya keadaan pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Musi Rawas menurut Jenjang Kepangkatan Tahun 2016

No	Pangkat Golongan	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Golongan IV	1	5
2	Golongan III	12	65
3	Golongan II	6	30
4	Golongan I	-	-
	Jumlah	19	100

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian BPBD Kabupaten Musi Rawas

Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas menurut jenjang kepangkatan sampai pada tahun 2016 dengan keadaan pegawai golongan IV berjumlah 1 orang golongan III sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 6 orang. Jadi tingkat jejang kepangkatan pegawai sangat rendah dengan di bandingkan jumlah pegawai yang non PNS sebanyak 39 orang. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Pegawai BPBD Kab. Musi Rawas Menurut Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah (orang)	Persentase %
1	S2	-	-
2	S1	12	65
	D3	-	-
4	SLTA	7	35
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
	Jumlah		100

Sumber: Sekretariat BPBD Kabupaten Musi Rawas

2.2.Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan formal pegawai

Dalam menjalankan tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan dengan baik, maka haruslah memiliki SDM aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, kualitas yang memadai maksudnya agar mutu penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, sedangkan

kuantitas yang memadai maksudnya dapat menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dengan tingkat efektivitas organisasi, maka dilakukan wawancara dengan seorang musibah alam yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Komentar atas fenomena tersebut, maka dilakukan konfirmasi kepada pihak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, Pak Faisol, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

“Pada dasarnya struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi rawas sudah menggambarkan hubungan kerja dengan unit lainnya sudah ada keterkaitan untuk pencapaian suatu tujuan namun terkendalam sumber daya manusia, Kebijakan yang diambil oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mempekerjakan lulusan SMU sebenarnya sudah tepat, karena setiap aparatur di depan dikoordinir oleh Kepala Seksi yang bergelar Sarjana. Namun jika terjadi keluhan mengenai kualitas kinerja dalam penanganan bencana kurang optimal.”. .”(Hasil Wawancara dengan Bapak Faisol, S.Sos 20/04/2017. Jam 13.05)

Kondisi tersebut diatas sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.8 di bagian depan, dimana pegawai yang berpendidikan SMU atau SLTA mencapai 16 orang dari total karyawan yang ada dengan jumlah total mencapai 19 orang . Dengan permasalahan diatas juga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Indikator Kerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	20.000.000,-	13.947.538,-	69,74
Output	Tersedianya telepon, internet dan listrik	3 rekening	3 rekening	100
Outcome	Terlunasinya tagian rekening telepon, internet dan listrik	1	1	100

Sumber data: Lakip BPBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2016

Dengan melihat data diatas, untuk tercapainya tujuan didalam organisasi dapat dilihat output dan outcome mencapai realisasinya 100% dalam kinerja dalam penyediaan alat jasa komunikasi dan masalah pada sumber anggaran input mencapai 69,74% karena disebabkan oleh banyaknya kegiatan dan komikasi yang lakukan pada kegiatan bencana atau dikatakan bencana alam di daerah kabupaten Musi Rawas.

2.3.Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan karier

Pendidikan formal tidak secara penuh menentukan kualitas pegawai. Pendidikan dan pelatihan selama menjalankan tugas (*in-jobtraining*) ternyata cukup mampu untuk meningkatkan mutu pegawai. Selama tiga tahun terakhir telah

dilakukan pendidikan dan latihan pemeriksaan dan penelaahan investasi daerah. Sampai dengan saat ini jumlah karyawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 58 adalah orang yang terdiri dari 19 PNS dan honor sebanyak 39 orang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah dengan diterapkannya metode diskusi dan pembahasan investasi dengan wacana lingkungan hidup terutama untuk sektor kehutanan dan industri yang memiliki kecenderungan menghasilkan bencana alam yang dikategorikan berbahaya terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Struktur organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari pejabat eselon II satu orang dijabat oleh Sekretaris Daerah, Pejabat eselon III satu orang dijabat oleh Kepala Pelaksana, Pejabat eselon IV empat orang dijabat oleh satu orang sekretaris dan tiga orang dijabat oleh kepala seksi.

Tabel 4.10. Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas di BPBD pada Tahun 2016

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1	PIM II	1 orang
2.	PIM IV A	3 orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian BPBD Kabupaten Musi Rawas

Melihat tabel diatas menunjukkan rendahnya pegawai dalam meningkatkan pendidikan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. Pembinaan lain yang juga dilakukan terhadap para pegawai adalah pembinaan moral dengan ceramah-ceramah keagamaan pada setiap hari Jumat dan melalui rapat staf serta pertemuan khusus. Kepada para pegawai yang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik, sebagai bentuk penghargaan kepadanya dipercaya untuk menduduki jabatan tertentu (apabila memenuhi persyaratan) dan menerima kenaikan pangkat otomatis. Sistem perencanaan dan pengembangan karir pegawai dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan daftar urut kepangkatan dan prestasi yang mampu ditunjukkan pegawai. Sejalan dengan kemajuan jaman dan adanya ketentuan yang mempersyaratkan kriteria tertentu untuk menduduki suatu jabatan, maka antusiasme personil untuk mengikuti program pengembangan kualitas aparatur sangat tinggi.

3. Sistem Penghargaan

Pemimpin memberikan penghargaan yang pantas sesuai dengan pekerjaan secara profesional menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas bapak Paisol, S.Sos adalah:

“memberikan penghargaan terhadap pegawai yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu memang kita tidak memberikan penghargaan berupa materi atau uang hal ini terkait dengan anggaran yang di sediakan Pemerintah Daerah, kita sering memberikan promosi jabatan bagi yang berprestasi dan di ikutkan diklat-diklat.”. (Hasil Wawancara dengan bapak Paisol, S.Sos. 20/04/2017 jam. 13.05)

Dari penjelasan tersebut di atas, dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan memang dapat dikatakan bahwa kebijakan yang telah

dihasilkan seorang terhadap bawahan mengenai tugas yang diberikan sesuai dengan tepat waktu, sehingga staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah diberikan riwet dan penghargaan oleh atasan terhadap kinerja yang bagus melalui tim penilai dari organisasi lain yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, lebih lanjut Pak Faisol, S.Sos menambahkan sebagai berikut:

“Tersediannya anggaran sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas, karena beban kerja di iringi dengan jumlah untuk mencapai tujuan organisasi. Perkerjaan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta pertimbangan kemampuan dan kemauan individu. Sehingga pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.”(Hasil Wawancara dengan Bapak Faisol, S.Sos. 20/04/2017. Jam 13.05)

Dari penjelasan tersebut di atas, dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan bahwa anggaran dalam pelaksanaan kegiatan atau program disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah anggaran yang ada.

Sedangkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Pak Tugiman, SH, antara lain:

“ ya, kurangnya informasi dan anggaran mengenai peningkatan pendidikan di lingkungan pemerintahan Musi Rawas terhadap kualitas sumber daya manusia, tapi dari segi pengembangan ilmu lainnya seluruh pegawai apabila ada kegiatan pelatihan lainnya terus mengikutinya.””(Hasil Wawancara dengan Bapak Tugiman, SH 24/04/2017. Jam 13.30)

Dengan hasil wawancara diatas maka saya menarik kesimpulan bahwa setiap peningkatan pendidikan sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas melihat perkembangan ilmu cara-cara mengatasi permasalahan di dalam penanganan bencana di kabupaten musu rawas haru sesuai dengan gerakan pegawai dari segi tahapan simulasi sampai tahapan penanggulangan bencana.

Kemampuan dan keahlian sudah ada yang berikan kepada pegawai yang meningkatkan kinerja, sehingga motivasi setiap pegawai harus sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang ada dalam menjalankan tugas. Dengan anggaran sudah disesuaikan dengan pelaksanaan yang ada. Sehingga bisa berjalannya suatu roda dalam organisasi tersebut. Lebih lanjut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Pak Tugiman, SH adalah:

“peningkatan kinerja pegawai dilakukan melalui pelatihan dan kursus pernah ada perlu mengikuti sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk pelayanan masyarakat. Sehingga pengembangan potensi dilakukan dengan diklat, dan memberikan penghargaan terhadap jabatan yang ada. Sedangkan anggaran yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi namun perlu ditinjau dengan fasilitas yang ada.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Tugiman, SH. 24/04/2017. Jam 13: 30)

Dari hasil wawancara diatas, bahwa kemampuan seorang pegawai disesuaikan dengan tingkat jabatannya dan kurangnya anggaran tentang tunjangan pegawai diberikan fasilitas kepada pegawai sehingga semangat terhadap apa yang dijalankan. Jadi tinggal profesionalisme yang terjadi dalam peningkatan kinerja pegawai adalah diberikan suatu dorongan setiap pegawai untuk melakukan potensi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga pegawai diberikan dukungan oleh pimpinan dalam meningkatkan perkembangan diri sehingga diterima dikalangan masyarakat.

4.Mekanisme Sistem Kerja

Berbagai Upaya Penanggulangan Bencana yang akan di lakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang di timbulkan secara lebih rinci.

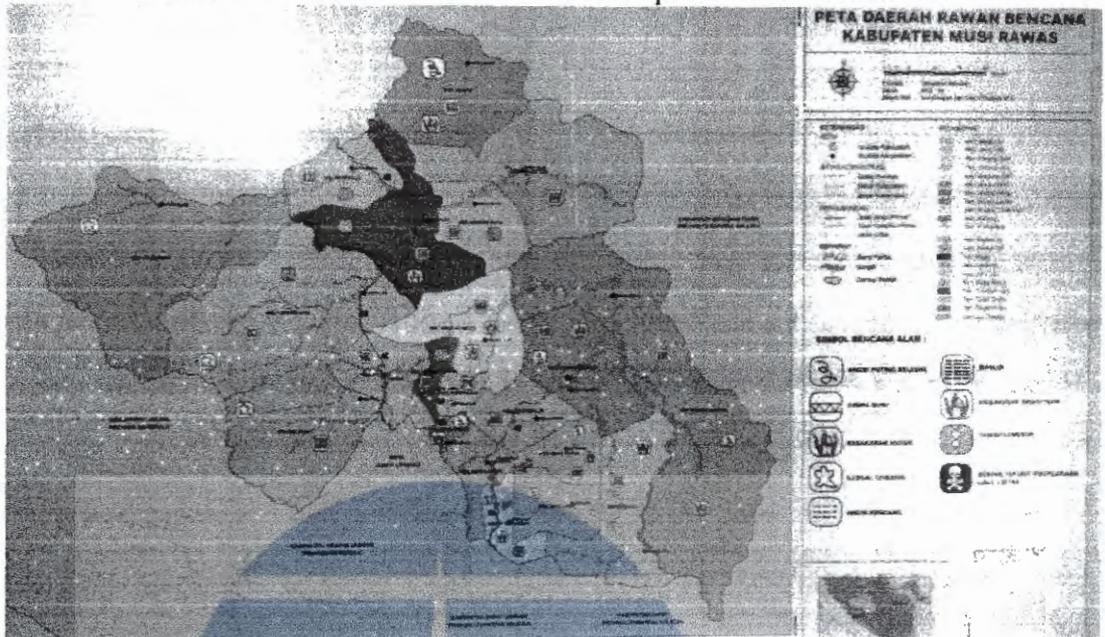
3.1. Pencegahan dan Mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang di lakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang di timbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi di lihat dari sifatnya dapat di golongan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

- f. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- g. Pembuatan brosur/leaflet/poster;
- h. Penelitian/Pengkajian karakteristik bencana;
- i. Pengkajian/ analis resiko bencana;
- j. Pembentukan organisasi atau satuan gugus bencana;

Gambar 4.2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas 2016

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

- a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, daerah rawan bencana;
- b. Pengawasan terhadap pelaksana berbagai peraturan penata ruang yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- d. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;

Gambar 4.3 Surat Edaran Bupati Musi Rawas .

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/034/BPBD/2017
TENTANG
ANTISIPASI DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Dalam rangka menghadapi musim kemarau tahun 2017 dan menciptakan Zero Hotspot di Kabupaten Musi Rawas, maka diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1. Membuat Sekat Bakar / Canal Blok dan Embung di Wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan Pemantauan titik Hotspot.
3. Melengkapi Sarana dan Prasarana dalam upaya Antisipasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta pelatihan regu kebakaran.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja melalui kegiatan penyuluhan.
5. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Regu Kebakaran Desa di sekitar Wilayah Kerjanya.
6. Melaksanakan patroli rutin didalam wilayah kerja dan sekitarnya.
7. Perusahaan Perkebunan dan IUPHHK-HTI wajib menjaga wilayah izinnya dari bahaya kebakaran.
8. Melaporkan secara periodik (perbulan) kegiatan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta kejadian kebakaran di wilayah kerjanya kepada Bupati Musi Rawas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti dan terimakasih.
BUPATI MUSI RAWAS

Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas 2017.



Gambar 4.4 Pengawasan ke perusahaan perkebunan.



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas.

5.2 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan di laksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan di lakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang di lakukan antara lain:

- a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis penanggulangan bencana;
- c. Inventarisasi sumber daya kedaruratan;
- d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik;
- e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
- f.

Gambar 4.5. Posko Satgas Siaga Banjir Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas 2017.

4.3. Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajiaan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

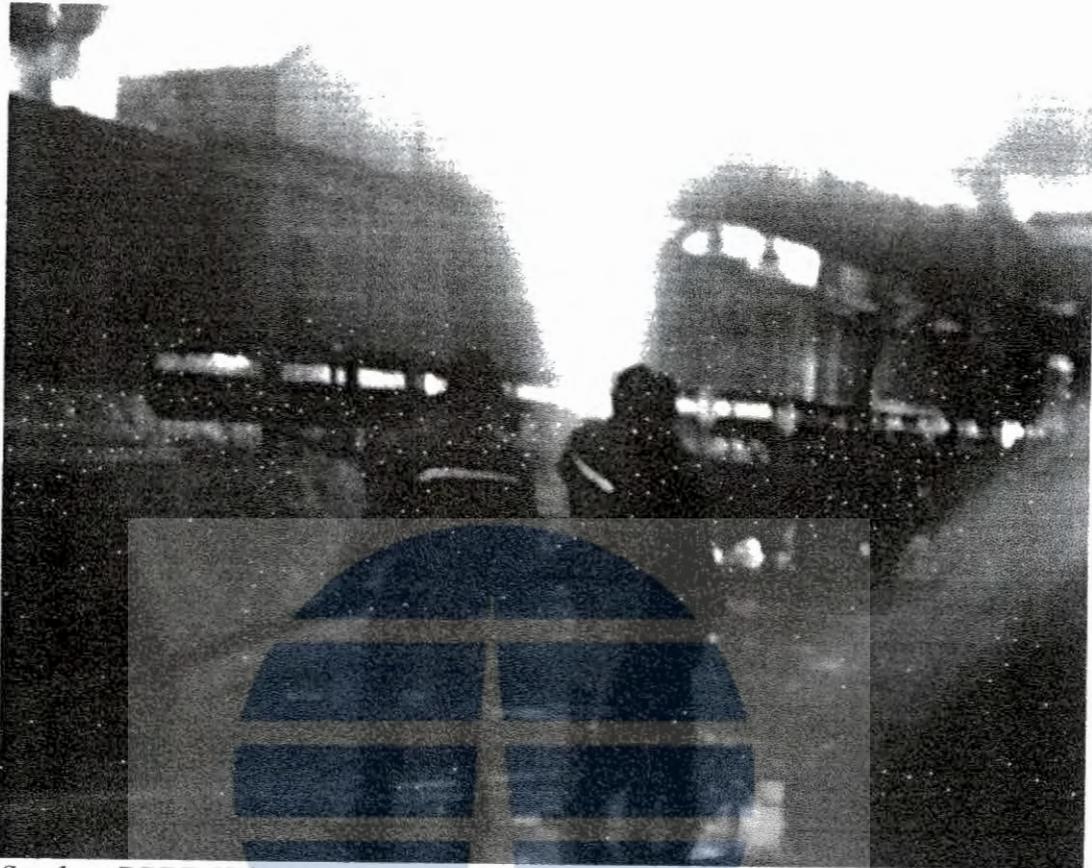
Gambar 4.6. Evakuasi korban banjir



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas.

Gambar 4.7. Photo penyelamatan korban banjir & kebakaran





Sumber: BPBD Kabupaten Musi Rawas 2017.

4.4. Pemulihan

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada rehabilitasi adalah untuk mengendalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Perbaikan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;

- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban

Sedangkan tahap rekontruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus di lakukan melalui suatu perencanaan yang di dahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait.

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

Dengan melihat sistem kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam hal penanggulangan bencana, Untuk mengetahui lebih jauh dalam penanganan bencana di Kabupaten Musi Rawas telah di lakukan wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Pak Paisol, S.Sos mengatakan:

“ Kami (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas)telah melakukan sosialisasi dengan mengundang perwakilan tiap satu kecamatan diwakili oleh 25 orang, yang terdiri dari Lurah/kepala desa, kepala lingkungan, tokoh masyarakat desa dan masyarakat luas.. Bukan Cuma berkoordinasi dengan

instansi pemerintahan tapi juga mengundang lembaga / organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana. iya, dalam segala kegiatan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas selalu siap, cepat dan tepat untuk ketepatan lokasi kejadian contohnya didesa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Adaya luapan sungai Lakitan mengakibatkan perahu penduduk karam dan menimbulkan korban jiwa kemaren. Petugas kita langsung bergerak menuju lokasi terjadinya bencana, Alhamdulillah korban yang luka-luka dapat tertolong ini semua berkat kesiapan petugas dan kerja sama dengan pemerintah Kecamatan atau Desa setempat, di samping itu kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Musi Rawas.”(Hasil Wawancara dengan bapak Paisol, S.Sos 24 /04 2017. Jam 13.05)”

Dengan hasil wawancara diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sudah optimal dalam penanganan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana memang di akui masih ada hambatan terkait dengan sumber daya manusia dan peralatan yang di miliki.

5. Tata Hubungan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

Diketahui bahwa lingkungan ekteral maupun intern yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatn Musi Rawas harus diantisipasi dan diadaptasikan mengenai permasalahan-permasalahan penanganan bencana.

Kerjasama dengan isntansi lain yakni instansi teknis diluar Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan wujud daripada karakteristik lingkungan kerja yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan instansi lain dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, karena dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dan dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang penjagaan, dan perlindungan terhadap masalah bencana alam seperti hutan harus dijaga jangan sampai di bakar. Dengan kerjasama maka akan didapat teknologi baru, informasi baru untuk dianalisis, diproses, diambil dan disebarakan bila perlu karena suatu organisasi dengan

kekosongan informasi tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Disamping itu dengan adanya hubungan yang harmonis dari masing-masing unit pelaksana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri dengan unit-unit lainnya dalam mengantisipasi perkembangan situasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. Maka dilakukan berbagai koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait
2. Pemerintahan Kecamatan
3. Pemerintah desa
4. Masyarakat

Untuk mengkonfirmasi hal ini maka dilakukan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengemukakan tujuan dapat tercapai bilamana adanya dukungan dan kerjasama dari instansi lain agar penanganan bencana dengan baik.

Untuk mengkonfirmasikan fenomena kerjasama ini dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Bapak Agus Susanto, AP yang mengemukakan sebagai berikut :

“....Kita (Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas) selama ini sudah koordinasi dengan baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas karena seperti di ketahui Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas ada relawan Tagana di samping itu tugas pokok dan fungsi kami adalah mendata sebagai akibat dari bencana tersebut dan menyalurkan bantuan, yang menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan terkendali masalah alat transportasi.”(wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas pak Agus Susanto, 24/03 2017, 12.00)

Gambar 4.8. penyerahan bantuan korban bencana



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas 2016.

Begitu halnya juga dengan logistik yang harusnya dapat didistribusikan secepatnya, tapi karena keterbatasan perahu dan jalur akses darat semuanya lumpuh akhirnya relawan hanya mendistribusikan ke daerah yang masih dapat dijangkau. Untuk daerah yang sudah tidak dapat dijangkau lagi maka, relawan harus menunggu surutnya air dan sebagiannya lagi didistribuiikan dengan menggunakan perahu nelayan. alat transportasi adalah salah satu penghambat pelaksanaan tugas para relawan. Sehingga mereka bekerja tidak sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana. “pertolongan secara cepat dan akurat” artinya bertindak cepat dengan mendahulukan kondisi yang paling parah. Namun karena transportasi para relawan hanya melakukan pertolongan didaerah yang paling mudah dijangkau terlebih dahulu.

Apabila terjadi bencana masalah kesehatan menjadi masalah utama, Untuk mengetahui hal tersebut kami juga mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Ibu drg.Hj. Mifta Hulumi, M.Kes

“Apabila terjadi bencana kami selalu berkoordinasi Koordinator penanganan bencana dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas” (Wawancara: Ibu drg.Hj Mifta Hulumi, M.Kes)

Gambar 4.9. pertolongan medis korban bencana



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 2016

Untuk mengetahui kondisi di lapangan terutama daerah rawan bencana kami konfirmasi dengan Camat Muara Kelingi Bapak Firdaus, S.Sos.

“Sebelumnya kami sampaikan Kecamatan Muara Kelingi merupakan daerah langganan banjir pada saat musim penghujan karena luapan sungai musu kami sangat terbantu dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas setiap ada gejala akan terjadi banjir kami langsung kontak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas idialnya memang harus ada relawan siaga bencana di tempat kami ini, di samping itu apabila terjadi bencana banjir kami juga menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas untuk penyaluran bantuan logistik”.. (wawancara : dengan Camat Muara Kelingi Bapak Firdaus, S.Sos 23-03-2017)”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah Badan yang berperan sebagai tokoh utama dalam penanggulangan bencana tentu harus mempunyai beberapa kesiapan sebelum terjun dalam sebuah bencana. Oleh karena itu salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Musi Rawas adalah menyediakan peralatan penanggulangan bencana. Hasil pengamatan dan analisis diatas menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi pemerintah daerah dalam upaya penanganan bencana untuk meningkatkan kinerja organisasinya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penanganan bencana di daerah.

Secara garis besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan fungsi pengkomandoan dalam hal penanganan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan Badan yang boleh dikatakan baru saja lahir, saat itu sudah harus memikul beban yang belum mampu dilakukan. Bahkan mereka belum mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsinya, dan saat itu juga sudah diberi tanggung jawab untuk mengomandoi semua instansi dan organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana tersebut.

Organisasi yang dulunya mengomandoi penanggulangan bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas harusnya tidak langsung lepas tangan begitu saja, karena semua sadar bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah Badan yang baru saja dibentuk bahkan kantor yang mereka tempati pun masih transisi, Sumber Daya Manusia masih terbatas dan masih minimnya peralatan penanggulangan bencana yang di miliki. Tidak ada komando yang jelas menandakan bahwa koordinasi sudah pasti tidak berjalan. Semua tugas penanggulangan terbengkalai disaat sumber daya

manusia tersedia dan tidak dimanfaatkan. Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Bapak Despriarta, SE Beliau mengatakan bahwa

Pada saat itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas baru di bentuk pada pertengahan tahun 2015 kami betul-betul bingung apa yang mesti kami lakukan karena jujur kami bukan dari basic penanggulangan nencana, kami hanya mencoba menjalankan tugas Negara. Kami akui bahwa pada saat itu kami ibarat bayi yang baru saja lahir dan hanya bisa menangis ketika kelaparan. Kami butuh petunjuk dan pengarahan dari pemerintah daerah ataupun instansi yang dulunya mengomandoi penanggulangan sebelum kami ada. Kami sebelumnya tidak punya basic penanggulangan, maka dari itu kami harusnya diberikan pelatihan ataupun pengetahuan sebagai pendukung dalam menjalankan tugas kami. Karena jujur kami sudah sering mendengar suara sumbang. Jadi jangankan koordinasi, tugas dan fungsi Badan yang kami tempatipun pada saat itu sama sekali belum kami pahami. (wawancara: 24-03-2017)”

Hasil wawancara diatas membuktikan bahwa koordinasi pada saat penanggulangan bencana banjir diawal 2015 tidak ada sehingga penanggulangan yang terlihat hanyalah sebuah kekacauan. Bukan karena tidak mau mengadakan koordinasi namun karena belum memahami tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, Padahal Koordinasi yang baik dalam penanganan bencana dapat diartikan sebagai hubungan dan interaksi di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam pemberian bantuan kepada korban bencana. Keperluan koordinasi tersebut dapat muncul di level internasional, nasional, atau di lapangan. Tergantung kepada cakupan bencana itu sendiri.

Tujuan utama koordinasi di dalam konteks bencana adalah berupa efektivitas respon terhadap bencana dimaksud. Koordinasi yang solid sering dinyatakan terbukti mampu mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan sekaligus merupakan faktor sukses utama di dalam penanganan bencana. Misalnya pada tanggap-darurat, sebuah tanggap-darurat yang terkoordinasikan dengan baik merupakan faktor kunci di dalam efektivitas tanggap-

darurat terkait. Kurangnya koordinasi juga sekaligus merupakan salah satu sebab, di antara beragam sebab yang ada, gagalnya sebuah tanggap-darurat bencana. Koordinasi dapat berlangsung vertikal (yaitu, di antara berbagai pihak di berbagai level yang berbeda di dalam penanganan bencana) maupun horizontal (yaitu, antar-pihak pada level yang sama di dalam rantai penanganan bencana). Berkenaan dengan siklus hidup bencana, koordinasi dapat dilakukan dengan sistem komando, dengan konsensus, atau dengan sendirinya dan terjadi secara otomatis. Pada tanggap-darurat yang ditandai oleh pentingnya kecepatan. Misalnya, koordinasi dengan sistem komando merupakan pilihan paling tepat. Pada fase rekonstruksi dan pemulihan ketika banyak tindakan telah dilakukan sebagai respon terhadap bencana dan banyak hal telah mulai mapan maka koordinasi dapat terjadi secara otomatis.

Dilakukan baik oleh para korban maupun berbagai pihak yang telah hadir sebelumnya sebagai bagian dari respon bencana. Sekalipun penting, bukan berarti pelaksanaan koordinasi di dalam menangani suatu bencana selalu berlangsung mulus dan tanpa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut, di antaranya, berkenaan dengan prosedur-prosedur kelembagaan. Kepemimpinan di dalam proses koordinasi bencana juga merupakan salah satu tantangan tersendiri. Semua tantangan itu tidak termasuk sebuah penghalang buat terlaksananya penanggulangan bencana, Tapi hanya menjadi salah satu faktor. Oleh karenanya koordinasi harus tetap berjalan, baik pada saat terjadi bencana maupun kondisi normal. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Paisol, S.Sos sebagai Koordinator dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Musi Rawas. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Kami telah melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait, pemerintah kecamatan/pemerintah desa misalnya kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas dalam hal penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terkena dampak bencana, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas apabila ada masyarakat terserang penyakit atau ada yang membutuhkan penanganan medis akibat bencana dan tentu kita selalu membangun hubungan dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa terutama di wilayah yang menjadi langganan terkena bencana seperti bencana banjir di kecamatan muara kelingi, kecamatan muara lakitan, kecamatan BTS ulu cecar, kecamatan megang sakti untuk daerah rawan longsor seperti kecamatan selangit, kecamatan terawas, kecamatan tiang punggung kepungut (wawancara dengan Pak Paisol, S.Sos, 24-04-2017)”

Dari pernyataan beliau nampak bahwa koordinasi yang di bangun oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Rawas sudah sesuai dengan apa yang di harapkan.

6. Kepemimpinan

kepemimpinan secara tidak langsung dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja rasa aman, menumbuhkan kepercayaan pada bawahan, suasana kerja yang kondusif serta terutama sekali kinerja yang mampu diraih dalam sebuah organisasi kerja, kemampuan dan keterampilan pemimpin. Dalam memberikan pengarahan serta bimbingan merupakan faktor dominan dalam mencapai efektifitas organisasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Pak Faisol S.Sos, antara lain:

“Saya dalam hal mengomandoi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas disiplin selalu saya terapkan di mulai dari apel pagi sampai persiapan atau penanganan bencana di lapangan tapi di kala ada pegawai yang mengalami musibah masalah kekeluargaan selalu saya tunjukan atau memberi contoh kepedulian sesama pegawai.(Wawancara dengan Pak Paisol,S.Sos, 24-03-2017, jam 11.00) “

Dan kasi Kedaruratan dan Logistik Despriarta, SE yang mengatakan bahwa :

“Masalah disiplin memang sangat tinggi di organisasi kami Badan Penanggulangan bencana hal ini karena pimpinan kami selalu memberikan tauladan, Tapi di samping itu kami sangat senang karena rasa kekeluargaan di kantor kami walaupun terkadang terkendala dana apabila kita ke lapangan karena dalam hal pencairan dana ada mekanismenya tapi bagi kami hal itu tidak menjadi kendala .(wawancara, 24-03-2017)”

Memang benar apa yang dikatakan oleh bapak koordinator bidang kedaruratan dan logistik bahwa setiap terjun ke masyarakat tentunya butuh dana yang diperuntukkan makan dan minum serta biaya transportasi (bahan bakar), hanya saja disetiap lembaga pasti memiliki dana cadangan apalagi menyangkut penanggulangan bencana. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan pertolongan sesegera mungkin. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan tanpa harus menggunakan biaya yang banyak, tinggal dipilah-pilah apa yang dapat dilakukan sebelum dana dari pemerintah kabupaten dicairkan.

Jadi pada dasarnya pemimpin sangat dibutuhkan guna menciptakan organisasi menjadi efektif dan efisien, berhasil guna karena peran pemimpin dapat mendorong pada kinerja pegawai. Hal tersebut disebabkan faktor pemimpin adalah dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Peran pemimpin menjadi sangat penting karena pemimpin yang dapat menentukan kondisi kerja bawahannya atau pegawainya. Untuk mencapai keadaan tersebut maka instansi serta pimpinan seharusnya melakukan penempatan pegawai secara selektif dan tepat, agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan atau skil yang dimiliki oleh seorang pegawai.

Pemimpin atau *leader* memiliki berbagai pengertian, oleh karena itu , pemimpin merupakan dampak interatif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Menurut Faisol S.Sos, Pemimpin mempunyai peran penting dalam

suatu organisasi terkait dengan fungsinya sebagai perencana, mengkoordinasi, perumus kebijakan, fungsi pengawasan dan pengarahan. Ini yang dimiliki oleh kepemimpinan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kebencanaan selama kurun waktu 2010 - 2015 adalah sebagai berikut

- 1) Peningkatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang optimal;
- 2) Peningkatan perencanaan dan sistem informasi kebencanaan;
- 3) Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional;
- 4) Peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Peningkatan dan pendayagunaan fasilitas latihan melalui kerjasama pihak ke ketiga.
- 6) Peningkatan penempatan tenaga dalam dan luar negeri serta mengeliminir ekses – ekses negatif yang timbul akibat kebijakan ini;
- 7) Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan produktivitas;
- 8) Peningkatan perlindungan dan pengawasan kebencanaan;

D. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah di peroleh dalam penelitian, selanjutnya akan di lakukan analisis pembahasan dengan mengacu pada konsep Efektifitas Organisasi yang di kembangkan oleh Thosa (2000:98) sesuai dengan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Menurut Thoha untuk mendiognosa organisasi yang sering di kenal dengan model enam kotak weisbon. Dari temuan penelitian maka dapat di katakan bahwa Efektifitas penanganan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Musi rawas

belum tertangani dengan baik. Berdasarkan konsep Thoha tersebut untuk melihat efektifitas Badan Penanggulangan Bencana. Ini terlihat dari kecepatan dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas terutama pada saat terjadinya bencana.

Sementara dari perspektif jawaban pertanyaan apa yang terjadi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat tanggap darurat yang di lakukan dalam situasi terjadi bencana dan pasca bencana. Peneliti melakukannya dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu dan di gunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu serta di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan (Widodo & Mukhtar, 2000:15). dengan pemilihan konsep yang di kemukakan oleh Thoha tersebut akan nampak mana hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam penanganan bencana beserta pemecahannya sebagai berikut:

1. Di lihat dari indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja organisasi dalam hal peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten musu Rawas adalah tujuan berorientasi pada kinerja.

Hambatan yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara adalah kurangnya koordinasi dalam menjalankan perkerjan dan Sumber Daya Manusia. Untuk itu perlu adanya perekrutan Tenaga kerja yang selektif yang memahami masalah bencana dan tak kalah penting perlu di tambahnya anggaran, peralatan kebencanaan dan pelatihan-pelatihan atau diklat kebencanaan bagi pegawai.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pendukung dari tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah. Struktur organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam hal penanggulangan bencana. Namun dalam penempatan atau pengisian jabatan belum sesuai dengan basis kebencanaan tapi hal ini bisa di atasi dengan pelatihan atau diklat kebencanaan.
3. Memberikan penghargaan terhadap pegawai yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu pemberian penghargaan tidak musti dalam bentuk materi atau uang hal ini terkait dengan anggaran yang di sediakan Pemerintah Daerah, tapi memberikan promosi jabatan bagi yang berprestasi dan di ikutkan diklat-diklat.dengan demikian akan memberikan semangat dan motivasi kerja.
4. Mekanisme kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan sosialisasi kebencanaan, peringatan-peringatan daerah rawan bencana dan himbaun-himbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mentaati hal-hal akan menimbulkan bencana. Dalam penanganan apabila terjadi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Musi Rawas selalu siap siaga untuk mengurangi resiko korban bencana dan pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas selalu berkoordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas di dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya. Koordinasi sudah berjalan dengan baik dengan instansi terkait, Namun di sini terkendala masalah luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas perlu adanya pembentukan relawan-relawan yang di tempatkan di kecamatan-kecamatan untuk menangani pertolongan pertama apabila terjadinya bencana.
6. kepemimpinan secara tidak langsung dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja rasa aman, menumbuhkan kepercayaan pada bawahan, suasana kerja yang kondusif serta terutama sekali kinerja yang mampu diraih dalam sebuah organisasi kerja, kemampuan dan keterampilan pemimpin. Dalam memberikan pengarahannya serta bimbingan merupakan faktor dominan dalam mencapai efektifitas organisasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Terutama dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas seorang pimpinan harus mengomandoi atau memberikan tauladan disiplin di mulai dari apel pagi sampai persiapan atau penanganan bencana di lapangan tapi di kala ada pegawai yang mengalami musibah masalah kekeluargaan selalu saya tunjukkan atau memberi contoh kepedulian sesama pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pada bagian atau bab penutup ini akan disajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yang disinkronkan dengan tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tuntas mengenai tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam hal penanganan bencana dan kemudian mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pada analisis yang dilakukan terhadap faktor struktur organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, temuan di lapangan menunjukkan bahwa penempatan individu tidak optimal dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Demikian pula masih terbatasnya Sumber Daya manusia dan peralatan yang di perlukan dalam penanganan bencana, Sistem koordinasi dengan instansi serta begitu luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas hal ini berdampak kurang optimalnya dalam penanganan bencana kepada para daerah yang terkena musibah bencana, terutama pada tiap tahapan yang ada, baik pada proses penanganan bencana alam dan bencana non alam (ulah manusia). Dari indikator dalam efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah tujuan, struktur organisasi, tata hubungan, sistem penghargaan, mekanisme sistem kerja, dan

kepemimpinan. Belum optimal terutama sistem koordinasi dengan instansi terkait, Sumber Daya Manusia masih belum memadai peralatan yang di miliki masih belum sesuai dengan begitu luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Pada analisis yang dilakukan terhadap faktor struktur organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, temuan di lapangan menunjukkan bahwa penempatan individu tidak optimal dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Faktor kemampuan administratif pegawai atau sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal pegawai belum sepenuhnya memenuhi syarat, sementara jenjang pendidikan karier belum optimal yang disebabkan oleh minimnya dukungan dana bagi pendidikan fungsional untuk peningkatan kinerja para pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten musu Rawas, maka dilakukan upaya penanganan Bencana melalui pembentukan relawan-relawan yang di tempatkan di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan penanganan bencana.

2. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara optimal, maka dibutuhkan peralatan kebencanaan dan alokasi dana untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan diklat kebencanaan secara sistematis dan berkelanjutan, dan untuk jangka panjang perlu dilakukan pola rekrutmen yang memperhatikan tingkat pendidikan dari pegawai yang berbasis pendidikan yang mendukung kegiatan penanganan bencana.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Edisi Revisi 2010. Yogyakarta : RINEKA CIPTA
- Digman, Laser A, 1996, *Strategic Management: Concepts, Dcision, Cases Business Publication*, Inc. Plano, Texas.
- Hasibuan , 1960, *Organisasi Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Hidayat, Syarif, 2000, *Dilema Otonomi Daerah, Perluasan Wewenang Daerah vs Wewenang Elite Politik Daerah*, Jurnal Analisis CSIS Tahun XXIX/No.
- Keban, T, Yeremias, 1999, *Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah Di Indonesia*, PJKA Volume 3 No. 2 Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2000, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Siagian, Sondang. P., 2010, *Management Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, M Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga,hal 4.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Cetakan ke-17 Bandung : ALFABETA
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode dan teknik)*, Trasito, Bandung
- Tim. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal & Tesis Mahasiswa*. Universitas Terbuka : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasProgram Studi Ilmu Administrasi Publik
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun. 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas

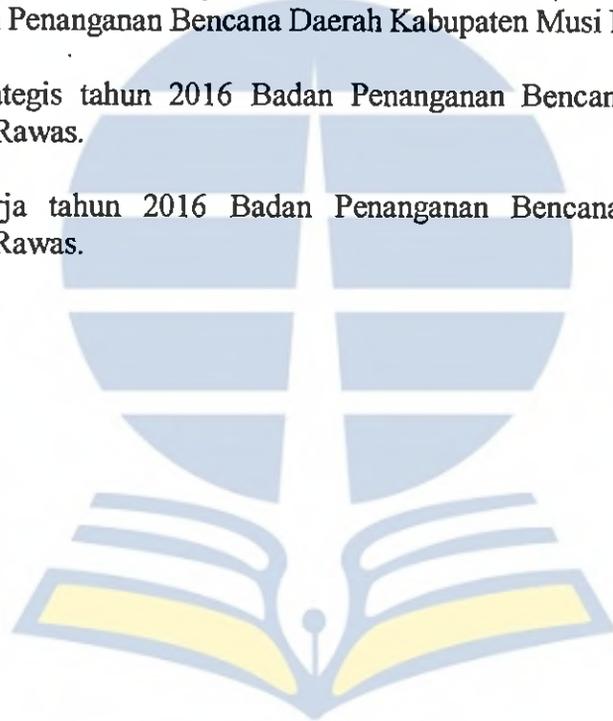
Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2013 tentang pembentukn organisasi dan tata kerja Badan Penganan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun2016 Oleh Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Strategis tahun 2016 Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja tahun 2016 Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.



**PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATRA SELATAN**

1. Tujuan
 - a. Apakah pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sudah sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas?
 - b. Bagaimana target dan realisasi kegiatan serta kejadian bencana di Kabupaten Musi Rawas dalam 2 tahun terakhir?
2. Struktur
 - a. Apakah Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Musi Rawas telah menggambarkan sifat hubungan kerja dari masing-masing unit atau bagian organisasi?
 - b. Apakah struktur yang ada cocok dalam pencapaian tujuan ?
 - c. Apakah Struktur Organisasi yang ada mendukung pada meningkatnya motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan ?
 - d. Apakah Struktur yang ada telah menggambarkan batas wewenang pembagian tugas, tanggung jawab masing-masing unit organisasi secara jelas ?

3. Sistem Penghargaan.

- a. Bagaimana terhadap pegawai yang berprestasi apakah ada penghargaan di berikan ?
- b. Apakah ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai untuk kepentingan organisasi yang bersifat ekstra ?

4. Mekanisme Sistem Kerja

- a. Bagaimana penyelesaian tugas pekerjaan dalam hal penanggulangan bencana sudah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan ?
- b. Siapa saja yang terkait dalam penanggulangan bencana ?

5. Tata Hubungan

- a. Apakah bentuk dari kerja sama dengan instansi lain ?
- b. Apakah kerja sama dengan dengan instansi lain tersebut menyangkut hal administrasi ataukah penetapan kebijakan penanggulangan bencana ?
- c. Apakah ada kerjasama masing-masing unit kerja dengan unit kerja instansi lain ?

6. Kepemimpinan

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan oleh pimpinan dalam memberikan Perhatian terhadap kesulitan yang di hadapi pegawai ?
- b. Bagaimana gaya kepemimpinan dalam organisasi ?



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

43232.p

Jl. Pembangunan Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp/Fax. (0733) 452006 Lubuklinggau 31626



SURAT REKOMENDASI/PERSETUJUAN PENELITIAN
Nomor: 360/105/BPBD/2017

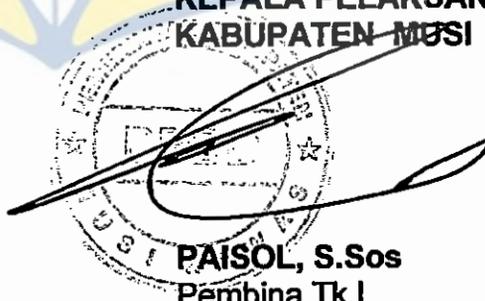
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan kepada :

Nama : A.Darsan
NIM : 500633191
Mahasiswa : Pascasarjana MAP UT
Judul : Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
Pembimbing : Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si.

Untuk melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dari tanggal 07 April s.d. 10 Juni 2017.

Demikian surat rekomendasi/persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 05 April 2017
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MUSI RAWAS



PAISOL, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19620705 198810 1 001